

**STUDI KOMPARATIF KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA INDONESIA DAN HUKUM
TATA NEGARA ISLAM**



**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh:

RUSDI

NPM : 1421020114

Program Studi : Siyasah

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI RADEN INTAN
LAMPUNG
1439 H/2018 M**

ABSTRAK

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh sebuah Lembaga Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Sedangkan dalam ketatanegaraan Islam, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh peradilan *Madzhalim* dan *Qadhi Al-Qudha*. Lembaga-lembaga peradilan di Indonesia hanya menjalankan fungsi peradilan. Sedangkan, lembaga-lembaga peradilan dalam Islam, berfungsi sebagai lembaga peradilan dan juga berfungsi sebagai lembaga yang menangani urusan-urusan lain di luar urusan peradilan, seperti pengelolaan gaji, dan tunjangan sosial, mengurus pelaksanaan ibadah lahiriah, harta wakaf dan lain sebagainya.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana fungsi dan wewenang kekuasaan kehakiman dalam hukum tata negara Indonesia dan hukum tata negara Islam? dan bagaimana persamaan dan perbedaan fungsi dan wewenang kekuasaan kehakiman dalam hukum tata negara Indonesia dan hukum tata negara Islam?.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi dan wewenang kekuasaan kehakiman baik dalam hukum tata negara Indonesia dan hukum tata Negara Islam serta adakah persamaan dan perbedaannya.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), menggunakan pendekatan yuridis normatif sosio historis dengan metode analisa deskriptif dan komparatif. Penelitian ini juga bersifat *deskriptif analitik*, yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang disusun, dijelaskan, dianalisis serta diinterpretasikan dan kemudian disimpulkan.

Dapat disimpulkan bahwa fungsi kekuasaan kehakiman dalam hukum tata negara Indonesia adalah menjalankan fungsi peradilan sedangkan dalam hukum tata negara Islam selain melaksanakan fungsi peradilan juga melaksanakan fungsi lain diluar fungsi peradilan, wewenang kekuasaan kehakiman dalam hukum tata negara Indonesia di pegang oleh MA yang membawahi lingkungan (PN, PA, PM, PTUN) dan MK, sedangkan wewenang kekuasaan kehakiman dalam tata negara Islam kewenangannya dipegang oleh Khalifah (Pemimpin). Persamaan antara kekuasaan kehakiman dalam hukum tata negara Indonesia dan Islam adalah sama-sama mempunyai tujuan yang sama yaitu menegakkan hukum dan keadilan. Lalu perbedaan antara kekuasaan kehakiman dalam hukum tata negara Indonesia dan Islam adalah perbedaan fungsi dan wewenang, dan pedoman peraturan yang digunakan jika hukum tata negara Islam berpedoman pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasul sedangkan hukum tata negara Indonesia berpedoman pada Konstitusi.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nama : Rusdi

NPM : 1421020114

Jurusan : Siyasah

Fakultas : Syari'ah

Judul Skripsi : **STUDI KOMPARATIF KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA INDONESIA DAN HUKUM TATA NEGARA ISLAM**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Erina Pane, SH.M.Hum

NIP.197005022000032001

Agustina Nurhayati, S.Ag.M.H

NIP.197408162003122004

**Mengetahui
Ketua jurusan Siyasah**

Drs. Susiadi AS., M. Sos. I.

NIP.195808171993031002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **STUDI KOMPARATIF KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA INDONESIA DAN HUKUM TATA NEGARA ISLAM**, disusun oleh Rusdi, NPM.1421020114, Program Study : Siyasah, telah diujikan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, pada Rabu, 02 Mei 2018:

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Drs. Susiadi AS., M. Sos. I.

Sekretaris : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.

Penguji I : Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H.

Penguji II : Agustina Nurhayati, S.Ag.M.H.

DEKAN



Syarah S.Ag., M.Ag

0009011997031002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*¹



¹ Q. S. An-Nissa ayat 58.

PERSEMBAHAN

Dengan segala syukur kepada Allah Yang Maha Esa dan atas do'a dan dukungan akhirnya skripsi ini dapat di selesaikan dengan tepat pada waktunya, oleh karena itu skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kepada kedua orang tuaku ayahanda Rosli dan Ibunda Emi Yati, tercinta yang senantiasa dan tiada henti-hentinya memberikan do'a, semangat, dukungan kepada penulis dan selalu mendidik dan membesarkanku dengan do'a dan segenap jasa-jasanya yang tak terbilang demi keberhasilan cita-citaku.
2. Kakak dan adik-adik ku tercinta, khususnya Istiqomnatun Nisa (Chaca Anisa) yang selalu memberikan do'a, motivasi dan dukungan terhadap penulis sehingga dapat menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan hukum UIN Raden Intan Lampung

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Rusdi, lahir pada tanggal 10 Oktober 1995 di Desa Gunung Terang, Kecamatan Gunung Terang, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Anak ke-enam dari enam bersaudara, merupakan buah cinta kasih dari pasangan Bapak Rosli dan Ibu Emi Yati. Adapun riwayat pendidikan adalah sebagai berikut:

1. TK Tribakti Gunung Terang lulus tahun 2003
2. SDN 02 Gunung Terang (Kecamatan Gunung Terang, Kabupaten Tulang Bawang) lulus tahun 2008
3. SMP Negeri 02 Gunung Terang (Kecamatan Gunung Terang, Kabupaten Tulang Bawang) lulus tahun 2011
4. SMK HMPTI Banjar Agung Unit II Tulang Bawang.
5. Setelah itu penulis melanjutkan kejenjang perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Fakultas Syari'ah mengambil Jurusan Siyasah (Hukum Tata Negara). Selama menjadi mahasiswa penulis aktif di organisasi antara lain:
 - a. Anggota PMII UIN Raden Intan Lampung 2015-2016
 - b. Anggota IKAM TUBABA tahun 2016-2018

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah yang tidak terkira dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk dalam berjuang menempuh ilmu. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi yang menginspirasi bagaimana menjadi pemuda tangguh, pantang mengeluh, mandiri dengan kehormatan diri, yang cita-citanya melangit namun karya nyata membumi.

Skripsi ini berjudul **“STUDI KOMPARATIF KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM HUKUM TATA NEGARA INDONESIA DAN HUKUM TATA NEGARA ISLAM”**. Selesai penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dorongan, uluran tangan, dari berbagai pihak. Untuk itu, sepantasnya disampaikan ucapan terimakasih yang tulus dan do’a, mudah-mudahan bantuan yang diberikan tersebut mendapatkan imbalan dari Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ucapan terimakasih ini diberikan kepada:

1. Prof. Dr. Moh. Mukri, M, Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag, selaku Dekan Fakultas syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Drs. Susiadi AS, M. Sos. I selaku ketua Jurusan Siyasah Fakultas Syari’ah.
4. Dr. Hj.Erina Pane, SH. M.Hum selaku pembimbing I dan Ibu Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan dorongan serta motivasi kepada Penulis.

5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syari'ah yang telah mendidik, dengan tulus dan ikhlas selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah UIN RIL.
6. Petugas perpustakaan Fakultas Syari'ah dan perpustakaan pusat UIN RIL.
7. Teman-teman seperjuangan, M. Arif Hidayatullah, Anjar Kurniawan, Haris Samarga, Andi, Iwan, Robert, Ardi, Vera, Lisa, Reka, Yana, Nabila, Risti, Meila, Farida, Feni, Evi dan rekan-rekan satu angkatan tahun 2014 jurusan Siyasah A yang tak dapat kusebut satu persatu yang telah memberikan motivasi dan dukungan selama ini.
8. Keluarga besar KKN 77 dan 78 desa Titi Wangi yang telah menemani kurang lebih selama 40 hari di desa Titi Wangi.
9. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Akhirnya, dengan iringan terimakasih do'a dipanjatkan kehadirat Allah SWT, semoga segala bantuan dan amal baik dari semua pihak sekalian akan mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang menulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Bandar Lampung, 02 Mei 2018
Penulis

Rusdi
NPM.1421020114

DAFTAR ISI

| | |
|-----------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL | I |
| ABSTRAK | II |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | III |
| PENGESAHAN | IV |
| MOTTO | V |
| PERSEMBAHAN..... | VI |
| RIWAYAT HIDUP | VII |
| KATA PENGANTAR | VIII |
| DAFTAR ISI..... | X |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|--|---|
| A. Penegasan Judul | 1 |
| B. Alasan Memilih Judul..... | 3 |
| C. Latar Belakang Masalah..... | 4 |
| D. Rumusan Masalah | 8 |
| E. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 8 |
| F. Metode Penelitian..... | 9 |

BAB II KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM HUKUM TATA NEGARA ISLAM

| | |
|---|-----------------|
| A. Pengertian Hakim | 13 |
| B. Sejarah Kelahiran dan Perkembangan Kekuasaan Kehakiman dalam Ketatanegaraan Islam | 14 |
| C. Dasar Hukum Kekuasaan Kehakiman dalam Islam | 20 |
| D. Fungsi dan Wewenang Kehakiman dalam Hukum Tata negara | Isl am |
| E. Kedudukan Kekuasaan Kehakiman dalam Hukum Tata Negara Islam | 26 36 |

BAB III KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM HUKUM TATA NEGARA INDONESIA

| | |
|---|----|
| A. Pengertian Hakim | 43 |
| B. Sejarah Kelahiran dan Perkembangan Kekuasaan Kehakiman | 44 |

| | |
|---|----|
| C. Dasar Hukum Kekuasaan Kehakiman Dalam Tata Negara | In |
| donesia | 53 |
| D. Fungsi dan Wewenang Kehakiman dalam Tata Negara | In |
| donesia | 58 |
| E. Kedudukan Kekuasaan Kehakiman dalam Tata Negara Indonesia | 69 |

BAB IV STUDI KOMPARATIF KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA INDONESIA DAN HUKUM TATA NEGARA ISLAM

| | |
|--|----|
| A. Fungsi dan Wewenang kehakiman dalam Hukum Tata Negara Islam dan Hukum Tata Negara Indonesia | 71 |
| B. Persamaan dan Perbedaan antara Kekuasaan Kehakiman dalam Hukum Tata Negara Islam dan Hukum Tata Negara Indonesia.... | 76 |

BAB V KESIMPULAN

| | |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 83 |
| B. Saran | 84 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mempermudah dalam memahami skripsi ini dan menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan skripsi ini, maka penulis akan menguraikan istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini :

“Studi Komparatif Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia dan Hukum Tata Negara Islam”. Adapun beberapa istilah yang terdapat dalam judul dan perlu untuk diuraikan diantaranya sebagai berikut :

Studi Komparatif

Studi diartikan sebagai penelitian ilmiah; kajian; telaahan.² Sedangkan Komparatif diartikan dengan segala sesuatu yang berkenaan atau berdasarkan perbandingan.³ Jadi studi komparatif adalah penelitian ilmiah yang didasarkan atas perbandingan.

Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubungan dengan itu, harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim.⁴

Perspektif

Perspektif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sudut pandang, pandangan.⁵ Perspektif dapat juga diartikan sudut pandang atau pandangan dan tinjauan hukum islam terhadap keadaan sekarang ataupun yang akan datang.⁶

²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2011), hal. 1342

³*Ibid*, hal.719

⁴Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Pasal 24 dan 25.

Hukum Tata Negara Indonesia

Hukum Tata Negara menurut Prof. Mr. Dr. J.H.A. Logemann adalah serangkaian kaidah hukum mengenai jabatan atau kumpulan jabatan di dalam negara dan mengenai lingkungan berlakunya hukum dari suatu negara/hukum mengenai organisasi negara.⁷

Hukum Tata Negara Islam

Tata Negara Islam/Siyasah Syar'iyah ialah pengurusan hal-hal yang bersifat umum bagi negara Islam dengan cara yang menjamin perwujudan kemaslahatan dan penolakan kemudaratatan dengan tidak melampaui batas-batas syariah dan pokok-pokok syariah yang kulliy.⁸ Tata Negara Islam adalah segala sesuatu yang menegenai peraturan-peraturan, sifat, dan bentuk pemerintahan suatu negara berdasarkan syariat Islam.

Berdasarkan penjelasan istilah secara terminologis di atas maka dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah suatu upaya untuk mengkaji secara mendalam mengenai fungsi dan wewenang kehakiman dalam perspektif hukum tata negara Indonesia dan hukum tata negara Islam, dalam konteks ini yang menjadi sorotan peneliti adalah mengenai fungsi dan wewenang kehakiman serta persamaan dan perbedaan dalam perspektif hukum tata negara Indonesia dan hukum tata negara Islam.

⁵ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), Edisi IV.

⁶ Mas'ud Khasan Abdul Qahar, *Kamus Ilmiah Populer*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), hal.283.

⁷ C.S.T. Kansil, dan Cristine S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) Edisi II, hal.72.

⁸ Abd Wahab al-Khalaf, *Al-Siyasah wa al-Syariyah*, Dar Ansor, Kairo, 1977, hlm 15.

B. Alasan Memilih Judul

Alasan penulis memilih judul “Studi Komparatif Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia dan Hukum Tata Negara Islam” ini yaitu :

1. Alasan Obyektif

- a. Kajian tentang kekuasaan kehakiman perlu untuk dibahas karena dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia dan dalam Ketatanegaraan Islam terdapat perbedaan.
- b. Melakukan perbandingan terhadap persamaan dan perbedaan kekuasaan kehakiman dalam tatanegara Indonesia dan tata negara Islam.

2. Alasan Subjektif

- a. Penelitian ini sesuai jurusan yang penulis tekuni yaitu siyasah.
- b. Penelitian ini didukung dengan beberapa literatur yang memadai sehingga penulis berkeyakinan bahwa penelitian ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang penulis rencanakan.

C. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum.⁹ Sebagai konsekuensi Negara hukum, maka Indonesia harus menghormati dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip Negara hukum. Salah satunya adalah prinsip pemisahan kekuasaan, menurut Montesque dalam masalah pemisahan kekuasaan ia membedakannya dalam tiga bagian pemisahan kekuasaan dan biasanya dikenal dengan teori *Trias Politica*,

⁹Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Pasal 1 ayat (3).

diantaranya kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.¹⁰ Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.¹¹ Oleh karena itu, prinsip lain yang juga dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan pemerintahannya adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.¹²

Dalam hal kekuasaan kehakiman, dengan adanya perombakan dan perubahan sistem peradilan, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menunjukkan semangat kemandirian kekuasaan kehakiman, khususnya Pasal 24 ayat (1, 2, dan 3) yang berbunyi: (1). Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, (2). Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, (3). Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.¹³

¹⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2002), hlm. 150.

¹¹ Undang-Undang No 48 Tahun 2009, *Tentang Kekuasaan Kehakiman*, Pasal 1 ayat (1).

¹² Bab 1 (Ketentuan Umum) Penjelasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹³ Perubahan Ke-4 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 24 ayat 1, 2, 3.

Demikian pula dalam ketatanegaraan Islam, pemisahan kekuasaan dalam Islam lebih dikenal dengan istilah *Shulthan Tasyri'iyah* (legislatif), *Shulthan tanfiziyah* (eksekutif), *Shulthan qadhaiyyah* (yudikatif). Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka. Artinya, pihak-pihak yang bukan merupakan ahli dalam bidang hukum atau pihak yang ingin ikut campur padahal ia tidak mengetahui apapun tentang hukum tersebut, hal ini tidak dibolehkan secara syara' untuk ikut campur dalam peradilan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kerugian yang akan ditanggung oleh pihak-pihak yang sedang berperkara.

Dalam rangka penegakan hukum, lembaga yang berfungsi menjalankan kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Islam adalah peradilan *Madzalim* dan *Qudhi Al-Qudhat*. Akan tetapi, selain berfungsi sebagai lembaga peradilan, pejabat *Madzalim* juga berwenang terhadap urusan-urusan lain di luar urusan peradilan, seperti pengelolaan gaji dan tunjangan sosial, mengawasi atau pemeliharaan harta wakaf, dan memperhatikan pelaksanaan ibadah lahiriah yang menjadi hak-hak Allah seperti (shalat Jum'at, shalat hari raya, ibadah haji, dan jihad).¹⁴ Sedangkan di Indonesia urusan-urusan tersebut ditangani oleh lembaga tersendiri di luar lembaga peradilan. Bagaimanakah lembaga-lembaga peradilan tersebut menjalankan fungsinya dan mendistribusikan wewenangnya diantara sesama lembaga peradilan. Serta bagaimana perbedaan kedua sistem kekuasaan kehakiman, padahal keduanya mempunyai tujuan yang sama yaitu menegakkan hukum dan keadilan.

¹⁴ Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, (Jakarta: Gema Insani), hlm. 66-70.

Negara sudah berdiri pada masa Rasulullah. Ia menangani urusan-urusan penting negara. Ia pun menangani urusan-urusan pengadilan, militer, dan administrasi. Itu adalah otoritas atau mandat Tuhan kepadanya. Banyak ayat yang menjelaskan bahwa Allah memilih Muhammad sebagai Nabi-Nya untuk menjadi pemberi solusi (*al-hakim*) dan pemimpin bagi manusia.

Allah SWT. Berfirman:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ۖ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا

Artinya; *Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat.*¹⁵

Makna ayat ini bahwa sesungguhnya Allah telah memilih Muhammad dan menurunkan Al-Quran kepadanya sebagai penjelas tentang cara menyelesaikan persoalan dengan apa yang Allah tetapkan, baik berupa perintah atau larangan. Dengan demikian, Nabi tidak menyelesaikan persoalan berdasarkan pemikiran atau ketetapan sendiri, tetapi berdasarkan ketetapan dan hukum Tuhan.

Ayat lain yang mengisaratkan bahwa Nabi dipilih sebagai utusan dan hakim, juga memerintahkannya untuk menegakkan keadilan adalah Q.S Al-Maidah ayat 42 yang berbunyi:

سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْأَلُونَ لِلْسُّخْتِ ۖ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ۖ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا ۚ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

¹⁵ Q.S. An-Nisa [4]: 105

*Artinya: Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.*¹⁶

Adanya persamaan bahwa pada kedua sistem kenegaraan tersebut terdapat lembaga-lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman, namun dalam pelaksanaannya terdapat berbagai perbedaan, seperti perbedaan fungsi dan distribusi wewenang. Hal ini membuat penulis tertarik untuk meneliti apa saja perbedaan fungsi tersebut dan bagaimanakah lembaga-lembaga tersebut mendistribusikan wewenangnya. Padahal seharusnya lembaga-lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman hanya berwenang menagani masalah peradilan.

Selain itu ternyata sistem kekuasaan kehakiman yang dijalankan pada masa awal sejarah ketatanegaraan Islam ternyata pada saat ini tidak lagi diterapkan secara utuh oleh negara-negara yang dalam Undang-Undang Dasar negaranya menyatakan bahwa Islam adalah agama Negara. Bahkan ada indikasi bahwa negara-negara Islam tersebut juga menjadikan sistem hukum lain sebagai sumber hukumnya, termasuk sistem hukum barat yang jelas-jelas pernah dan mungkin sampai saat ini masih menjadi musuh dari negara-negara muslim.

¹⁶Q.S. Al-Maidah [5]: 42.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana fungsi dan wewenang kekuasaan kehakiman, dalam hukum tata negara Indonesia dan hukum tata negara Islam ?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan fungsi dan wewenang kekuasaan kehakiman dalam hukum tata negara Indonesia dan hukum tata negara Islam ?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini diantaranya yaitu:

- a. Untuk mengetahui fungsi dan wewenang kekuasaan kehakiman, dalam hukum tata negara Indonesia maupun hukum tata negara Islam.
- b. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara kekuasaan kehakiman dalam hukum tata negara Indonesia dan hukum tata negara Islam.

2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan, khususnya ilmu politik, baik politik dalam tataran hukum positif maupun politik Islam.
- b. Secara praktis, untuk memperluas wawasan bagi penulis untuk memenuhi syarat menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah salah satu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali, mengelola dan membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh dan membahas suatu permasalahan.¹⁷ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian dalam skripsi ini termasuk dalam penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka adalah penelitian yang digunakan dengan menggunakan literature (kepustakaan) baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu yang digunakan sebagai data primer.¹⁸

b. Sifat penelitian

Kemudian sifat penelitian ini yaitu deskriptif analitis, yang dimaksud deskriptif analitis adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada dan fenomena tertentu.¹⁹

¹⁷Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta,1994), Hlm.2.

¹⁸Susiadi, *Metodelogi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung , 2015), Hlm.10.

¹⁹Kaelan M.S., *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Pradigma, 2005), Hlm. 58.

2. Data dan Sumber Data

Sumber data adalah tempat dari mana data itu diperoleh.²⁰ Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat data bahan utama dalam membahas suatu permasalahan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari Al-Qur'an, Al-Hadist, UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang lain.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer, meliputi hasil-hasil penelitian dan pendapat pakar hukum.²¹
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum tambahan atau bahan yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini yang berupa kamus dan ensiklopedia.

3. Pengumpulan Data

Sebuah penelitian hukum pada umumnya memiliki beberapa pendekatan, pendekatan yang peneliti gunakan diantaranya, pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan perbandingan (*comvarative approach*), pendekatan historis (*historical approach*).

Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka yang meliputi sumber primer yaitu catatan-catatan sejarah dan hukum positif yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Sumber sekunder yaitu buku-buku literatur ilmu

²⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), Hlm.114.

²¹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cat-6, 2012),Hlm.32.

hukum, politik, dan fiqh siyasah, serta tulisan-tulisan lain termasuk media internet untuk mengakses bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan.

4. Pengolahan Data

Setelah sumber mengenai data sudah terkumpul berdasarkan sumber diatas, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data tersebut dan diproses sesuai dengan kode etik penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Editing

Editing adalah pengecekan terhadap data-data yang telah diperoleh untuk mengetahui catatan itu cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk keperluan berikutnya.

b. Koding

Koding adalah usaha untuk membuat klasifikasi terhadap data-data atau bahan-bahan yang telah diproses untuk mengetahui, apakah data-data yang telah diproses sesuai atau tidak.²²

c. Sistematisasi

Sistematisasi adalah penempatan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.²³ Yang dimaksud dalam hal ini yaitu mengelompokkan data secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi dan urutan masalah.

²²Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta : Gramedia, 1985), hlm.29.

²³Suharsimi Arikunto, *Ibid*, hlm. 29.

5. Analisis Data

Setelah data diperoleh, selanjutnya dapat dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu digambarkan dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori untuk diambil suatu kesimpulan.²⁴ Selain itu, dalam menganalisis peneliti menggunakan teknik komparatif yaitu membandingkan antara kekuasaan kehakiman dalam hukum tata negara Indonesia dan kekuasaan kehakiman dalam hukum tata negara Islam.



²⁴Koentjorodinigrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 1993), hlm.202.

BAB II

KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA ISLAM

A. Pengertian Hakim

Hakim dalam perspektif ushul fikih berasal dari kata **حكم** (hakama) sama artinya dengan *qadhi* yang berasal dari kata **قاضي** artinya memutus. Sedangkan menurut bahasa adalah orang yang bijaksana atau orang yang memutuskan perkara dan menetapkan. Adapun pengertian menurut syar'a hakim yaitu orang yang diangkat oleh kepala negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugatan, perselisihan-perselisihan dalam bidang hukum perdata, oleh para penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan.²⁵

Hakim berasal dari bahasa Arab, *hakama*,²⁶ yang berarti menetapkan sesuatu dengan adil (tidak berat sebelah). Adil dan keadilan merupakan tujuan inti dari pada hukum. Tepatnya istilah adil mengandung pengertian meletakkan sesuatu pada tempatnya.²⁷ Kata "Hakim" adalah yang berhak membuat atau menetapkan hukum syara; dalam pandangan Islam yang berhak membuat dan menetapkan hukum dalam arti sebenarnya adalah Allah SWT. karena yang akan menjalankan hukum itu adalah manusia yang tidak mungkin berhadapan secara fisik dengan Allah pembuat hukum itu, maka tentu ada yang menyampaikan hukum Allah itu

²⁵Muhammad Salam Makdur, *Peradilan Dalam Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993), hlm 29.

²⁶Wildan Suyuti, *Kode Etik Hakim*, Jurnal Pusdiklat MARI Volume I, No 2, Jakarta, hlm 24.

²⁷*Ibid.*

kepada manusia. Penyampai hukum Allah tersebut adalah Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian hukum Allah itu baru diketahui dan berlakusetelah Nabi lahir, diutus dan menyampaikan kitab Allah tersebut. Hal ini berarti sebelum diutusnya Nabi belum berlaku beban hukum atas manusia.²⁸

B. Sejarah Kelahiran dan Perkembangan Kekuasaan Kehakiman dalam Ketatanegaraan Islam

Sebenarnya peradilan telah terjadi sejak adanya manusia di dunia ini. Pada masa Nabi Adam as., pernah terjadi pertikaian antara kedua anaknya yang bernama Qabil dan Habil, di mana Nabi Adam as. yang menjadi hakim dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Hanya saja bentuk peradilan pada masa itu belum dapat dikatakan peradilan seperti dikenal sekarang, karena pada saat itu belum dikenal yang namanya hakim dan tugas-tugasnya serta perundang-undangnya.²⁹

Hakim dalam sejarah kemanusiaan adalah Nabi Daud as. dan Nabi Sulaiman as. Pada masa mereka dijelaskan bahwa seorang hakim (qadha) harus mendengarkan kedua belah pihak sebelum memutuskan perkara dan harus memisahkan para saksi untuk mendengarkan pendapat mereka. Nabi

²⁸Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm.25-26.

²⁹Allaiddin Koto, *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 17.

Daud as. dan Nabi Sulaiman as. masing-masing diuji oleh Allah Swt. Sebagai bukti bahwa seorang qadhi tidak sembarang dipilih.³⁰

Pelaksanaan kekuasaan kehakiman di masa Rasulullah Saw. masih berada di dalam tangan Rasulullah Saw. Begitu pula, kekuasaan membuat undang-undang, melalui sunnah dan kekuasaan eksekutif. Meski demikian, sejarah telah mencatat bahwa hukum dan keadilan terlaksana dan tegak dengan sempurna. Hal itu bisa terjadi karena tuntunan al-Qur'an yang menjadi panduan hidup, yang menjadi akhlak Nabi Muhammad Saw.³¹

Mula-mula Nabi mengajarkan Islam di Mekah secara sembunyi-sembunyi. Baru pada akhir tahun ketiga dari awal kenabian, Nabi mulai menyiarkan agamayang dibawahnya dengan cara terang-terangan. Yang kemudian berakibat makin meningkatnya tindakan permusuhan dan penganiayaan oleh orang-orang kafir Mekah terhadap orang-orang Islam kurang lebih selama dua tahun. Kemudian pada puncaknya Nabi menganjurkan mereka mengungsi ke Abesinia.

Sementara itu enam orang tamu dari Yatsrib mengadukan kepada Nabi bahwa di yatsrib selalu dicekam oleh permusuhan antar golongan dan antar suku, khususnya antara suku Khazraj dan suku Aus. Mereka berharap Allah dapat menyatukan mereka melalui Nabi.³²

³⁰Samir Aliyah, Alih Bahasa Asmuni Solihah Zamaksyari, Sistem Pemerintahan, Peradilan dan Adat dalam Islam, (Jakarta: Khalifa, 2004), hlm. 285.

³¹Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam*, (Yogyakarta: PT. LKIS, 2010), hlm. 305

³²Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara, Ajaran, sejarah ,dan Penikiran*, Cet ke-5, (Jakarta: UIPress, 1993),hlm 8-9.

Pada musim haji kesebelas setelah kenabian, beberapa orang suku Kharaj, dua diantaranya dari Bani Najran masuk Islam. Sejak saat itulah nabi Muhammad menjadi pembicaraan hangat di kalangan penduduk Yatsrib.³³ Mereka menemui Nabi pada tempat yang sama. Yaitu Aqabah. Selain mengakui kerasulan Nabi Muhammad saw, mereka juga berjanji (berbaiat) kepada Nabi bahwa mereka tidak akan mempersekutukan Allah, mencuri, berbuat zina, berbohong dan tidak akan mengkhianati nabi. Perjanjian (baiat) ini dikenal dengan *Bai'at Aqabah Pertama*. Setelah peristiwa tersebut Nabi Muhammad mengutus Mus'ab Ibnu Umar untuk mengajarkan Islam kepada penduduk Yatsrib.

Kemudian pada musim haji berikutnya, sebanyak tujuh puluh tiga penduduk Yastrib yang sudah memeluk Islam berkunjung ke Mekah. Mereka mengundang Nabi untuk hijrah ke Yatsrib dan menyatakan lagi pengakuan mereka bahwa Nabi Muhammad Saw adalah nabi dan pemimpin mereka. Pertemuan ini berlangsung di tempat yang sama, yaitu Aqabah. Di sini mereka berbaiat kembali bahwa mereka tidak akan mempersekutukan Allah dan akan membela nabi seperti membela isteri dan anak mereka. Dan pada saat itu pula nabi akan memerangi musuh-musuh mereka dan bersahabat dengan sahabat-sahabat mereka. Nabi dan mereka adalah satu. Baiat ini dikenal dengan *Bai'at Aqabah Kedua*. Oleh para pemikir politik Islam kedua baiat tersebut dianggap sebagai batu-batu pertama dari bangunan Negara Islam.

³³Dewan Redaksi, *Sejarah Peradaban Islam dari Masa Klasik Hingga Modern*, Cet ke-1, (Yogyakarta: Jurusan SPI Fakultas Adab dan LESFI, 2003), hlm, 33-34

Setelah *Bai'at Aqabah Kedua* tindakan kekerasan terhadap kaum muslimin semakin meningkat. Bahkan kaum Quraisy sepakat akan membunuh Muhammad. Menghadapi situasi yang demikian, nabi Muhammad menganjurkan kaum muslimin untuk hijrah ke Yatsrib yang kemudian berubah mejadi Madinah. Di sinilah untuk pertama kali lahir satu komunitas Islam yang bebas dan merdeka di bawah pimpinan nabi Muhammad Saw. Tidak lama setelah menetap di madinah, nabi Muhammad Saw membuat dan menawarkan diberlakukannya suatu piagam yang mengatur kehidupan dan hubungan antara komunitas-komunitas yang merupakan komponen masyarakat yang majemuk di Madinah. Piagam tersebut lebih dikenal sebagai *Piagam Madinah*. Piagam inilah yang oleh banyak pakar ilmu politik Islam beranggapan bahwa piagam madinah adalah konstitusi atau undang-undang dasar bagi negara Islam yang pertama dan yang didirikan oleh Nabi Muhammad Saw di Madinah.³⁴

Sejak saat itulah Islam mulai dan permasalahan-permasalahan di masyarakat Madinah mulai diselesaikan dengan ajaran-ajaran Islam di bawah pimpinan nabi Muhammad saw sebagai pemimpin agama dan pemimpin Negara. Serta segala macam masalah penzaliman, yang pada perkembang berikutnya akan menjadi wilayah kekuasaan peradilan atau kekuasaan kehakiman.

³⁴*Ibid*, Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara*, hlm. 10.

Peradilan dalam sejarah perkembangan islam sudah ada sejak zaman Persia dan pada masa orang-orang Arab Jahiliyah, seperti Badan Hukum (Lembaga Kehakiman) yang dipegang oleh Banu Saham, Badan Ihtikan dan *Qur'ah* (para normal dan undian), serta Dewan *Madzalim* (yang ada sejak Zaman Persia).³⁵

Setelah Islam datang di negeri Arab, khususnya pada pemerintahan pertama Islam di Madinah, Dewan *Madzalim* atau Peradilan *Madzalim* tidak ada sampai pada masa Rasul, Rasul sendirilah yang menyelesaikan segala macam pengaduan terhadap masalah penzaliman para pejabat. Begitu pula pada masa Khulafa Al-Rasyidin, para sahabat tidak mengadakan lembaga ini karena anggota-anggota masyarakat pada masa itu masih dapat dipengaruhi oleh ajaran-ajaran agama.³⁶ Khalifah yang pertama kali mengadakannya adalah Abdul Malik Ibnu Marwan.

Pada masa awal Islam, hakim hanya mempunyai tugas yang terbatas. Kemudian pada masa pemerintahan Abbasiyah peradilan mengalami berbagai perkembangan dan perubahan, diantaranya lemahnya ijtihad hakim dalam menetapkan hukum karena telah berkembangnya empat madzab besar, para hakim memutuskan perkara di bawah kekuasaan pemerintah, dan lahirnya istilah atau kedudukan *Qadhi al-Qudha*, atau yang pada masa sekarang disebut dengan Menteri Kehakiman. Pada masa

³⁵ *Ibid*, Alaidin Koto, hlm. 31-33.

³⁶ T M Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, cet, ke-2, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 94.

inilah untuk pertama kalinya peradilan menjadi instansi terpisah yang berdiri sendiri.

Di Andalusia (Spanyol) *Qadhi al-Qudh* dinamai dengan *Qadhi al-Jama'ah* (Hakim Kolektif).³⁷ dengan hakim pertama adalah Yahya bin Yazid at-Tajibi. *Qadhi al-Jama'ah* ini berwenang mengangkat hakim-hakim daerah serta dikenal juga hakim-hakim khusus yang menangani bidang-bidang tertentu, seperti masalah perkawinan, perdata, dan sebagainya.

Jika pada masa sebelumnya *qadhi* diangkat dan diberhentikan oleh Khalifah, maka dengan adanya *Qadhi al-Qudat* (Hakim Agung) tugas tersebut diserahkan kepadanya. Pada masa ini juga, seluruh permasalahan yang berhubungan dengan badan dan kekuasaan kehakiman diatur dan ditangani langsung oleh *Qadhi al-Qudha*.

Qadhi al-Qudh ini pertama kali muncul pada masa Kekhalifahan Harun al-Anshari (113-182 H/731-789 M). Selanjutnya, pada daerah-daerah yang diperintah oleh seorang Gubernur (Amir) juga muncul Jabatan ini, seperti di Mesir, Syam (Suriah), dan Irak.

Pada perkembangan berikutnya, di masa pemerintahan Abbasiyah muncul jabatan *Qadhi al-Askar* (Hakim Militer). Jabatan *Qadhi al-Askar* ini pertama kali dibentuk pada Dinasti Mamluk di Mesir. Orang yang pertama kali menduduki jabatan ini pada masa Dinasti tersebut adalah

³⁷*Ibid*, Muhammad Salam Madkur, hlm. 49.

Isma'il bin Ishaq (200-282 H/815-895 M). Akan tetapi, pada masa sebelumnya, yaitu pada masa Dinasti Ayyubiyah (abad ke-12 sampai 13) di Mesir sudah muncul dengan *Qadhi al-Askar* pertamanya adalah Bahauddin as-Subhr (797-777 H/1307-1375 M). Kemudian pada masa Turki Ustmani (abad ke-19), muncul pula *Qadhi al-Askar* untuk Eropa dan Afrika.

Demikian sekilas mengenai sejarah dan perkembangan peradilan dan kekuasaan kehakiman dalam Kekhalifahan Islam. Mulai dari bentuk yang sangat sederhana, sampai pada bentuk yang sangat rumit, sehingga terkadang terdapat tumpang tindih wewenang dan tugas. Sejak seorang Qadhi diperbolehkan memutus perkara tanpa terikat suatu madzhab yang dianut oleh penguasa pada saat itu, sehingga muncul qadhi-qadhi untuk madzhab-madzhab tertentu. Serta sampai munculnya hakim kolektif untuk memutus satu perkara yang dihadapi, yang sebelumnya cukup ditangani oleh seorang qadhi.

C. Dasar Hukum Kekuasaan Kehakiman Dalam Islam

Bagi ummat Islam, Al-Qur'an adalah kitab suci yang diturunkan Allah SWT Tuhan Semesta Alam kepada Rasul dan Nabi-Nyayang terakhir Muhammad Saw melalui malaikat Jibril as untuk disampaikan kepada seluruh ummat manusia,³⁸ seperti firman-Nya:

³⁸Inu Kencana Syafi'ie, *Al-Qur'an Dan Ilmu Politik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm.1

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ
وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ

Artinya: (Dan ingatlah) akan hari (ketika) Kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri dan Kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.³⁹

Sebagai kitab suci, Al-qur'an merupakan pegangan umat Islam dalam segala aspek kehidupan (rahmatan lil'alamin), karena itu al-qur'an adalah sumber hukum bagi seluruh ummat manusia. Hal ini karena al-qur'an sebagai kumpulan peraturan-peraturan dasar bagi manusia untuk hidup di dunia maupun di akhirat, sudah tentu merupakan kitab paling banyak memuat tentang hukum.⁴⁰

Disamping itu, syari'at Islam merupakan tata aturan yang mencakup masalah dunia dan akhirat, maka syari'at Islam juga mengatur kehidupan kenegaraan yang meliputi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.⁴¹ Kekuasaan yudikatif merupakan kekuasaan pelaksana hukum dalam suatu negara. Dalam negara islam, hukum atau undang-undang tersebut bersumber dari Allah SWT (Al-Qur'an), sehingga kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan kehakiman yang bertugas melaksanakan hukum atau undang-undang yang bersumber dari Allah SWT, yaitu Al-Qur'an.

³⁹Q.S. An-Nahl , (16): 89

⁴⁰Inu Kencana Syafi'e, *Ilmu Pemerintahan Dan Al-Qur'an*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm.116.

⁴¹Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 2 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoven, 1997), hlm.70.

Allah telah memerintahkan kepada Nabi Daud AS untuk menjadi seorang hakim yang melakukan tugas menegakkan hukum dan keadilan di tengah-tengah manusia. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Shaad ayat 26 yang berbunyi :

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ
فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَظِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ
بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya: Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.⁴²

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menciptakan Daud sebagai khalifah di muka bumi ini supaya menghukumi diantara manusia dengan benar. Manusia harus sesuai dengan apa yang telah dianjurkan oleh Allah dan orang yang menghukumi tersebut adalah hakim. Menegakkan keadilan adalah kewajiban bagi orang-orang yang beriman setiap mukmin apabila menjadi saksi ia diwajibkan menjadi saksi karena Allah dengan sejujurnya dan seadil-adilnya serta dilarang mengikuti hawa nafsu dan menyelewengkan kebenaran.

⁴²Al-Qur'an Surat As-Shad ayat 26

Dalam ayat lain disebutkan:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا
أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ
كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

Artinya: dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.⁴³

Di dalam Al-Qur'an Allah memberikan amanat kepada manusia untuk menetapkan hukum diantara manusia, supaya terciptanya kehidupan yang adil. Allah berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.⁴⁴

⁴³Al-Qur'an Al-Maidah ayat 49.

⁴⁴Al-Qur'an An-Nisa ayat 58.

Pada dasarnya Allah menekankan kepada kaumnya untuk selalu berbuat adil, menegakkan kebenaran dan selalu mengerjakan kebaikan.

Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۗ
وَإِنْ تَلَوْا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.⁴⁵

Selain didalam Al-Qur'an, dalam hadis juga terdapat dasar hukum mengenai hakim, sebagaimana sabda Rasulullah SAW sebagai berikut:

وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِذَا تَقَاضَى
إِلَيْكَ رَجُلَانِ، فَلَا تَقْضِ لِلأَوَّلِ، حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الْآخِرِ، فَسَوْفَ تَذَرِي كَيْفَ
تَقْضِي. قَالَ عَلِيٌّ فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا بَعْدُ) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ
وَحَسَنُهُ، وَقَوَاهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ

Artinya: Dari Ali Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Apabila ada dua orang meminta keputusan hukum kepadamu, maka janganlah engkau memutuskan untuk orang yang pertama sebelum engkau mendengar keterangan orang kedua agar engkau mengetahui bagaimana harus

⁴⁵ Al-Qur'an An-Nisa ayat 135.

memutuskan hukum." Ali berkata: Setelah itu aku selalu menjadi hakim yang baik. Riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi. Hadits hasan menurut Tirmidzi, dikuatkan oleh Ibnu al-Madiny, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban.⁴⁶

Hakim tidak lain adalah wakil Allah dibumi untuk menegakkan hukum dan keadilan-Nya⁴⁷ yang sebenarnya ini menjadi tugas kepala negara/khalifah. Oleh sebab itu, kedudukan hakim merupakan kedudukan yang sangat tinggi karena hakim mempunyai tanggung jawab yang amat besar tidak hanya tanggung jawab terhadap sesama manusia tetapi juga kepada Allah. Bahkan Nabi sendiri mengatakan tentang tanggung jawab hakim ini, bahwa menerima jabatan hakim itu sama halnya menerima untuk disembelih tanpa menggunakan pisau.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ وَلِيَ الْقَضَاءَ فَقَدْ دُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ) رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حُرَيْمَةَ, وَابْنُ حِبَّانَ

Artinya: Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Barangsiapa diangkat sebagai hakim, ia telah disembelih dengan pisau." Riwayat Ahmad dan Imam Empat. Hadits shahih menurut Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban.⁴⁸

⁴⁶Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulughul Maram Mim Adillatil Ahkaam*, (Tasikmalaya: Pustaka Al-Hidayah, 2008), hadis No. 1417.

⁴⁷Haidar, *Durrar al-Hukkam*, hlm. 516.

⁴⁸Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar al-Asqalany, *Ibid*.

D. Fungsi dan Wewenang Kehakiman dalam Hukum Tata Negara Islam

Dalam suatu negara, menurut imam Al-Mawardi, seorang khalifah atau kepala negara berwenang mengangkat seorang hakim (*Qadhi*), dan hanya ia yang berhak atas pengangkatan tersebut.

Dalam rangka membantu menjalankan tugas-tugas kenegaraan, kepala negara berwenang mengangkat para pejabat yang terpercaya dan kompeten untuk menduduki beberapa posisi/jabatan dalam pemerintahannya, termasuk mengangkat seorang hakim (*qadhi*) untuk melaksanakan tugasnya dalam menjalankan hukum dan memutuskan perkara diantara pihak-pihak yang berselisih.⁴⁹

Ada tiga institusi yang berhak menjadi qadhi menurut Ibnu Farhun dalam kitab *Tabshiratul Hukkam* seperti di kutip oleh T.M. Hasbi ash-Shiddieqy. Ketiga institusi itu antara lain:⁵⁰

1. Kekuasaan Khalifah

Berkaitan dengan tugasnya untuk menjalankan hukum dan memutuskan perkara, seorang khalifah wajib memiliki keahlian dalam menyelesaikan perkara atau peradilan, selain keahlian-keahlian lain yang disyaratkan baginya sebagai kepala negara. Hal ini karena kepala negara berwenang atas segala urusan yang ada di negara yang menjadi wilayah kekuasaannya. Sehingga ia juga berkewajiban menangani seluruh masalah yang tidak dapat ditangani oleh *qadhi* yang

⁴⁹*Ibid.*

⁵⁰Alaiddin Koto, *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 116.

disebabkan karena lemahnya kemampuan mereka untuk menanganinya atau keseganan mereka karena menghadapi pihak tertuduh.⁵¹ Wewenang ini biasanya diberikan kepada seorang pejabat *madzalim*. Oleh karena itu, biasanya pula, dalam sistem kenegaraan Islam seorang kepala negara merangkap sebagai pejabat *madzalim*.

2. Kekuasaan Wizarah

Menurut sebagian ulama, seorang kepala negara boleh menyerahkan sebagian atau segala macam tanggung jawab kepada *wazir*. Atau dengan kata lain seluruh yang dilakukan oleh kepala negara, boleh pula dilakukan oleh *wazir*, kecuali tiga perkara, yaitu:

- a. Memberi mandat kekuasaan kepala negara kepada seseorang yang pantas menurutnya
- b. Mengangkat pejabat-pejabat institusi pemerintah, misalnya menetapkan *wiliyatul'ahdi* (putera mahkota)
- c. Kepala negara dapat memberhentikan seluruh pejabat, termasuk para pejabat yang diangkat oleh *wazir*.⁵²

Salah satu tanggung jawab yang dapat diserahkan kepada *wazir* adalah mengangkat seorang *qadhi* dengan suatu syarat ia memiliki keahlian dalam hal kehakiman.

⁵¹Imam al-Mawardi, *Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*, cet ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 162-168.

⁵²*Ibid*, Imam al Mawardi, hlm. 54.

3. Kekuasaan Imarah (Penguasa Daerah, Gubernur, atau Bupati)

Jabatan yang diberikan kepada seorang umarah ada dua macam, yaitu:⁵³

a. Jabatan dengan wewenang umum yang dipegang oleh seorang *tafwidz* (Menteri dan Gubernur). Ada dua macam wewenang, yaitu:

1. Mendapatkan hak penuh oleh khalifah, sehingga oleh menangani seluruh persoalan dalam negeri
2. Boleh memutuskan hukum dan menangani masalah peradilan.

b. Jabatan dengan wewenang khusus dan terbatas yang dipegang oleh seorang *tanfiz* (menteri eksekutif). Ia hanya berperan sebagai mediator antara khalifah, rakyat, dan para gubernur, sehingga wewenangnya hanya terbatas pada menjalankan perintah dan kebijakan khalifah, yaitu yang biasanya meliputi:

1. Mengatur ketentaraan
2. Menyusun kebijakan bagi rakyat, memelihara keamanan, serta menciptakan ketenteraman dalam rangka memimpin dan menjaga kepentingan rakyat.

Secara garis besar, kekuasaan kehakiman dalam hukum tata negara Islam dilaksanakan oleh dua lembaga peradilan sebagai berikut:

1. Peradilan *Madzalim*

Peradilan *Madzalim* merupakan lembaga peradilan yang menangani masalah kezaliman penguasa beserta keluarganya terhadap

⁵³*Ibid*, Imam al Mawardi, hlm. 63-68.

hak-hak rakyat.⁵⁴ Oleh karena itu, dengan adanya peradilan *Madzalim* ini diharapkan hak-hak rakyat dapat dilindungi, serta sengketa yang terjadi diantara para penguasa dengan rakyat dapat segera diselesaikan. Yang dimaksud dengan penguasa disini adalah seluruh jajaran pemerintahan mulai dari pejabat tertinggi sampai rendah, peradilan *Madzalim* ini sudah ada sejak masa jahiliyah, yang muncul setelah terjadinya persengketaan antara Ash Ibnu Wa'il dengan seorang lelaki dari penduduk Zahid, sebuah daerah di tanah Yaman.⁵⁵

Pada peradilan *Madzalim*, seorang qadhi *Madzalim* dapat bertindak tanpa adanya gugatan terlebih dahulu dari pihak yang merasa dirugikan. Artinya, apabila qadhi *Madzalim* mengetahui adanya kasus *Madzalim*, maka ia harus segera bertindak untuk menangani dan menyelesaikan kasus tersebut.

Adapun tugas dan wewenang majelis *Madzalim* adalah:⁵⁶

- a. Menangani pelanggaran pejabat pemerintah atas rakyat, untuk kemudian memberikan catatan yang bukruk baginya. Bahwa mereka telah melakukan penindasan dan memperlakukan tidak adil terhadap rakyat.
- b. Menangani tindakan-tindakan para pejabat yang mengambil harta (dari rakyat). Untuk menanganinya, (melihat) kembali pada undang-undang

⁵⁴Hasan Mu'arif Ambari, *Ensiklopedi Islam*, cet ke-1 jilid 2 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 51-52.

⁵⁵T.M Hasbi Ash- Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum*, hlm. 5.

⁵⁶Imam al Mawardi, *Op. Cit.* hlm. 80-83.

yang adil di dalam catatan atau pembukuan Negara. untuk kepentingan rakyat.

- c. Bertugas sebagai pencatat pembukuan administrasi negara. Hal ini karena mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kepercayaan dari kaum mukminin untuk mencatat kepemilikan harta (kaum muslimin).
- d. Menerima pengaduan para penerima gaji atas penyuntan gaji mereka atau keterlambatan pemberian gaji itu kepada mereka.
- e. Mengembalikan harta yang dirampas dan dikorupsi oleh pejabat. Hal ini ada dua macam, yaitu sebagai berikut: *pertama*, perampasan dan korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara, seperti harta yang dirampas dari pemiliknya oleh pejabat negara karena keinginannya untuk mendapatkan harta itu atau karena tindakan kesewenangannya terhadap pemiliknya itu. *Kedua*, tanah/harta yang dikuasai dengan paksa oleh orang-orang yang kuat dan mereka menggunakan tanah itu seakan-akan sebagai pemiliknya.
- f. Mengawasi harta wakaf. Bentuk wakaf ada dua macam: wakaf umum dan wakaf khusus. Untuk wakaf umum, ia dapat memeriksanya tanpa terlebih dahulu menerima pengaduan. Adapun untuk wakaf khusus, penanganan masalahnya bergantung pada adanya pengaduan pihak pemberi wakaf atau menerima yang berhak menerima wakaf itu saat terjadi persengketaan karena kasus seperti ini berkaitan dengan lawan kasus tertentu.

- g. Menangani kasus yang tidak mampu ditangani oleh para qadhi, yang disebabkan lemahnya kemampuan mereka untuk menanganinya atau keseganan mereka menghadapi pihak tertuduh.
- h. Menangani kasus-kasus pelanggaran kepentingan umum yang sulit ditangani oleh pejabat biasa, seperti tindakan berbuat mungkar secara terang-terangan yang sulit diberantas, tindakan mengganggu kelancaran dan keamanan lalu lintas yang sulit dicegah, dan tindakan menahan hak orang lain yang sulit diminta.
- i. Memperhatikan pelaksanaan ibadah-ibadah yang lahiriah, seperti pelaksanaan shalat hari Jumat, shalat hari raya, ibadah haji, dan jihad.
- j. Menangani kasus pertengkaran dan memberikan keputusan hukum bagi pihak yang bersengketa.

2. *Qadhi al-Qudha*

Tugas utama dari *Qadhi al-Qudha* adalah mengawasi, mengangkat, dan memecat para qadhi serta meninjau keputusan-keputusan yang mereka keluarkan.⁵⁷ Akan tetapi, seiring dengan perkembangan zaman, yaitu dimulai pada masa pemerintahan Abbasiyah, *Qadhi al-Qudha* pun berkembang menjadi *Qadhi al-Askar* (Hakim Militer). *Qadhi al-Askar* ini bertugas menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lingkungan militer.

⁵⁷Muhammad Salam Madkur, *Loc. Cit*, hlm. 49.

Adapun tugas dan wewenang pejabat *Qadhi al-Qudha* adalah:⁵⁸

1. Menyelesaikan persengketaan dan permusuhan, baik dengan penyelesaian secara damai dan dengan suka rela, maupun dengan paksaan melalui kekuatan hukum yang memaksa pihak yang sedang bersengketa itu untuk dijalankan.
2. Meminta suatu hak dari pihak yang menahan hak orang lain, kemudian menyampaikannya kepada pihak yang berhak setelah diketahui kepastian hukum itu merupakan haknya, melalui dua jalan: pengakuan atau adanya bukti.
3. Menjadi wali atas orang yang dilarang untuk bertransaksi sendirian, seperti karena gila atau masih kanak-kanak, dan membatasi tindakan orang yang menurut kebijakan perlu dibatasi, seperti karena kebodohnya, atau tidak dapat memelihara harta milik orang, serta meluruskan pelaksanaan transaksi orang seperti itu.
4. Menangani harta wakaf dengan menjaga harta dasarnya dan mengembangkan cabangnya serta mengumpulkan dan membagi-bagikan hasilnya kepada yang berhak. Jika dalam harta wakaf itu ada pihak yang berhak untuk mengurusnya, qadhi harus menjaganya, sedangkan jika tidak ada, qadhi harus mengurusnya. Hal ini jika karena harta wakaf itu milik umum, ia tidak dapat menjadi hak khusus bagi segelintir orang dan ia boleh mengubahnya menjadi milik umum, meskipun diperuntukkan untuk kalangan terbatas.

⁵⁸*Ibid*, hlm. 144-146.

5. Melaksanakan wasiat berdasarkan syarat pihak yang memberikan wasiat dalam perkara yang diperbolehkan oleh syariat dan tidak dilarang. Jika wasiat itu bagi orang-orang tertentu, pelaksanaannya adalah dengan menyerahkannya kepada orang-orang itu. Jika wasiat itu bagi orang-orang yang memiliki sifat tertentu, pelaksanaannya adalah dengan menentukan individu-individu yang berhak melalui ijtihadnya dan menyerahkannya kepada orang-orang yang berhak menurut ijtihadnya. Jika ada pihak yang diserahkan untuk melaksanakan wasiat itu, ia menyerahkannya kepada orang itu, sedangkan jika tidak ada, ia harus melaksanakannya.
6. Menikahkan para wanita janda dengan orang-orang yang sekufu (setingkat statusnya), jika mereka tidak memiliki wali nikah saat mereka akan menikah. Sementara itu, Abu Hanifah tidak menjadikan hal ini sebagai bagian dari hak qadhi (hakim) karena ia membolehkan wanita janda untuk menikahkan dirinya sendiri.
7. Melaksanakan hukum had atas pihak-pihak yang seharusnya dijatuhi hukum itu. Jika hal itu adalah bagian dari hak-hak Allah, ia berhak menangani proses hukumnya sendiri tanpa menunggu adanya pihak yang mengajukan tuntutan dan pengaduan jika kejahatan itu telah terbukti dengan pengakuan atau adanya bukti kuat. Adapun jika masalah itu adalah bagian dari hak-hak manusia, pelaksanaannya menunggu adanya tuntutan dari pihak yang berhak. Abu Hanifah

berkata, “Ia tidak dapat melaksanakannya kecuali dengan adanya pengajuan tuntutan dari pihak yang menuntut.”

8. Memeriksa kemaslahatan wilayah tugasnya, seperti mencegah terjadinya kejahatan di jalan-jalan dan padang pasir, serta membongkar bangunan yang tidak layak dibangun atau dipertahankan keadaannya. Ia boleh menangani hal ini meskipun tidak ada pihak yang menuntut. Abu Hanifah berkata bahwa tidak boleh menangani hal itu kecuali jika ada pihak yang mengajukan tuntutan. Akan tetapi, masalah tersebut adalah bagian dari hak-hak Allah yang padanya pihak yang dirugikan dan yang tidak dirugikan mempunyai hak yang sama, sehingga wewenang qadhi untuk menangani masalah itu menjadi lebih legal.

9. Memeriksa saksi-saksinya serta para pembantunya dan memilih wakil-wakilnya serta mengakui dan mengandalkan mereka jika mereka berlaku benar dan lurus, serta mengalihkan dan mengganti mereka jika tampak cacat dan berkhianat. Jika ia tidak mampu menyelesaikan masalah yang ia hadapi, pejabat yang mengangkatnya dapat dapat melakukan salah satu dari dua pilihan ini : ia dapat mengantikanya dengan orang yang lebih kuat dan lebih kapabel atau ia dapat memperkerjakan orang lain untuk membantunya sehingga dengan adanya bantuannya itu ia lebih kuat dan lebih berani dalam membuat keputusan.

10. Menyejajarkan dalam menangani masalah hukum manusia antara pihak yang lemah dan pihak yang kuat, dan bersikap adil dalam menetapkan keputusan antara pihak yang terhormat dan orang biasa, dan tidak mengikuti hawa nafsunya dalam mengurangi hak orang yang berhak atau condong pada kebatilan.

Pada hakekatnya, *Qadhi al-Qudha* dan peradilan *Madzalim* merupakan lembaga yang berada di bawah satu atap kekuasaan kehakiman (kekuasaan peradilan). Namun, kedudukannya mempunyai wilayah kerja yang berbeda. Peradilan *Madzalim* bertugas dan berwenang menangani permasalahan peradilan yang dilakukan oleh para penguasa atau pejabat negara, permasalahan penguasa dengan rakyat, dan hal-hal lain yang berkenaan dengan administrasi Negara (seperti inventaris Negara dan pengelolaan gaji). Serta mengawasi jalannya ibadah-ibadah pokok yang menjadi hak Allah (seperti shalat berjama'ah, shalat jum'at, shalat hari raya, ibadah haji, dan jihad). Sedangkan *Qadhi al-Qudha* pada awalnya merupakan peradilan pengawasan hakim. Akan tetapi, berkembang menjadi peradilan yang menangani masalah-masalah peradilan yang terjadi pada rakyat. Misalnya, perkawinan dan perdata.

Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan struktural yang sejajar antara Peradilan *Madzalim* dengan *Qadhi al-Qudha*. Akan tetapi, apabila *Qadhi al-Qudha* tidak dapat menyelesaikan suatu perkara, maka Peradilan *Madzalim* yang bertugas dan berwenang menyelesaikannya. Sehingga diperoleh suatu kesimpulan bahwa peradilan

Madzalim merupakan peradilan tingkat banding dan tingkat terakhir dalam susunan peradilan Islam.

E. Kedudukan Kekuasaan Kehakiman Dalam Hukum Tata Negara Islam

Jabatan hakim merupakan kedudukan yang berada dibawah khalifah. Yaitu suatu lembaga yang tersedia untuk tujuan menyelesaikan gugatan serta memutuskan perselisihan dan pertikaian.⁵⁹ Oleh karena itulah, jabatan hakim pada hakikatnya merupakan bagian dari tugas khalifah. Akan tetapi, untuk meringankan tugasnya yang sangat banyak, maka seorang khalifah boleh atau berwenang mengangkat seorang qadhi yang secara khusus menangani tugas peradilan. karena itulah, jabatan qadhi berada langsung di bawah khalifah. Artinya, khalifah sendiri yang bertugas mengawasinya, sehingga lembaga peradilan yang terdiri para qadhi bertanggung jawab secara langsung kepada khalifah. Bahkan apabila para qadhi yang berada dalam lembaga peradilan tersebut tidak dapat menyelesaikan suatu persoalan, maka khalifahlah yang wajib menanganinya. Hal inilah yang terjadi pada awal permulaan Islam, yaitu para khalifah melaksanakan sendiri jabatan qadhi.

Khalifah pertama yang menyuruh seorang khusus menjalankan fungsi qadhi adalah Abu Bakar beliau menyerahkan urusan qadhi kepada Umar ibnu Khathab. Lalu pada masa Umar bin khathab Beliau menunjuk

⁵⁹Ibnu Khaldun, *Muqadimah Ibnu Khaldun, Ahli Bahasa Ahmadi Tuha*, cet ke-2, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), hlm. 267.

Abu Darda' untuk menjadi qadhi di Madinah, Syuraih di Basrah, dan Abu Musa al-Asy'ari di Kuffah.⁶⁰

Perjalanan kekuasaan kehakiman dalam perspektif hukum tata negara Islam mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Pada setiap periode pemerintahan dan setiap wilayah (negara) memiliki sistem kekuasaan kehakiman sendiri sesuai dengan keadaan pada saat itu. Akan tetapi, Seluruh masih berpijak pada sumber hukum yang sama yaitu Al-Qur'an, sunnah Rasul, dan pendapat para ulama (*Ijma*),

Misalnya Arab Saudi, negara yang bercorak monarki murni. Al-Qur'an adalah Undang-Undang Dasar Negara dan Syari'ah sebagai sumber hukum dasar yang dilakukan oleh mahkamah-mahkamah syari'ah dengan ulama sebagai hakim-hakim dan penasehat-penasehat hukum (kerajaan) nya.⁶¹ Raja dengan dibantu oleh dewan menteri, mengawasi lembaga-lembaga eksekutif (*sulthan tanfiziyah*), legislative (*sulthan tasyri'iyah*), dan yudikatif (*sulthan qadhaiyyah*).

Di arab Saudi tidak terdapat dewan perwakilan yang anggota-anggotanya dipilih oleh rakyat, dan juga partai politik. Akan tetapi, yang ada adalah Majelis Syura yang anggota-anggotanya ditunjuk dan diangkat oleh raja. sekalipun demikian tidak dapat pula dikatakan bahwa kekuasaan raja di Arab Saudi itu mutlak dan tanpa batas, akan tetapi dibatasi oleh syari'ah, dan raja harus tunduk kepadanya. pelanggaran terhadap Illahi (hukum Allah) dapat dijadikan alasan atau dasar untuk menurunkan raja

⁶⁰ Allaidin Koto, *Op. Cit.* hlm. 63.

⁶¹ Suyuti pulungan, *Fiqh Siyasah...*, hlm. 185.

dari tahtanya. Seperti yang terjadi pada Raja Saud bin Abdul Aziz yang memerintah tahun (1953-1964) yang atas dasar kepentingan umum (*masalahah*), oleh sejumlah pangeran-pangeran senior Saudi, ulama dan pejabat tinggi kerajaan dianggap tidak layak lagi untuk memerintah, lalu diganti oleh saudara laki-lakinya, Faisal, yang memerintah sampai pada tahun 1975.⁶²

Berbeda dengan Arab Saudi, Negara Maroko berbentuk monarki berkonstitusi sebagaimana disebutkan dalam undang-undang dasar negara bahwa Negara Maroko adalah kerajaan yang berkonstitusi dan demokratis, dan kedaulatan berada di tangan bangsa atau rakyat yang disalurkan melalui lembaga-lembaga konstitusional yang telah ada. Juga dalam undang-undang dasarnya disebutkan bahwa Maroko menganut sistem banyak partai politik dan menolak sistem satu partai. Hukum adalah pernyataan tertinggi berada di tangan rakyat. Meskipun Islam disebut sebagai agama Negara, namun syari'ah Islam tidak disebut-sebut dalam undang-undang dasar Negara. Bahkan baik hukum perdata maupun pidananya, Maroko lebih banyak diwarnai oleh sistem hukum barat. Hukum Islam dari madzhab Maliki yang diberlakukan untuk umat Islam, hanya berlaku bagi permasalahan-permasalahan tertentu, yaitu perkawinan, pembagian harta warisan, dan wakaf, seperti di Indonesia.⁶³

⁶²Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Edisi ke-5, (Jakarta: UI-PRESS, 1993), hlm. 222

⁶³*Ibid.*

Tidak jauh berbeda sistem hukum di Maroko, sistem hukum Jordania banyak dipengaruhi oleh sistem hukum lain, khususnya Barat, meskipun agama Islam dinyatakan secara tegas sebagai agama Negara dan bahasa Arab sebagai bahasa resmi Negara. Sehingga hukum Islam yang diberlakukan bagi umat Islam terbatas pada permasalahan perkawinan, pembagian harta waris, dan perwakafan. Serta kekuasaan kehakiman dipegang oleh mahkamah-mahkamah yang mandiri dan menjatuhkan keputusan atas nama raja.

Sementara itu, kekuasaan legislatif berada di tangan parlemen, yang terdiri dari Senat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Raja. Kekuasaan eksekutif berada di tangan raja yang dilaksanakan oleh para menteri.

Dari Undang-Undang Dasar Mesir atau Republik Arab Mesir tahun 1980, dinyatakan bahwa Mesir adalah Negara sosialis demokratis. Islam merupakan agama negara, Prinsip-prinsip hukum Islam merupakan salah satu sumber utamanya. Meskipun demikian, penerapan sistem hukum Islam (secara utuh) di Mesir juga hanya terbatas pada masalah-masalah perkawinan, pembagian harta waris, dan wakaf. Sedangkan untuk hukum perdata lainnya dan hukum pidana, sebagaimana tercantum secara jelas dalam undang-undang dasarnya, prinsip-prinsip hukum Islam hanya merupakan salah satu sumber hukum utama disamping sumber-sumber hukum yang lain.⁶⁴

⁶⁴*Ibid.*

Berbeda dengan Negara-negara Islam yang lain, Irak yang mempunyai nama asli Republik Iran Syi'ah sedang berproses untuk memberlakukan hukum Islam bagi semua aspek kehidupan (sistem ketatanegaraannya).⁶⁵

Sama halnya dengan Negara-negara demokratis lainnya, kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat, dan rakyat jugalah yang menjadi sumber kekuasaan Negara. Serta prinsip hukum Mesir menempatkan seluruh rakyatnya sama dimuka hukum.

Pada dasarnya di Pakistan terdapat kesadaran bahwa Islam adalah kekuatan dan hal yang tidak dapat dipisahkan dari Republik Islam Pakistan (nama resmi Pakistan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1956). Namun di Pakistan telah menjadi beberapa kali perubahan dasar Negara. Hingga saat ini semangat Islam di negeri yang mayoritas penduduknya beragama Islam itu, masih mewarnai perjuangan kehidupan politiknya.⁶⁶

Namun secara garis besar, pada penelitian ini penyusun belum dapat menemukan bagaimana sistem hukum dan kekuasaan kehakimannya Pakistan secara jelas. Pada beberapa referensi yang ditemukan adalah pergolakan politik Pakistan yang selalu panas dan penuh dengan perdebatan tentang Islam sebagai alat politik itu sendiri.

Dari beberapa contoh Negara yang dalam Undang-Undang Dasar negaranya menyatakan secara jelas bahwa Islam adalah sebagai agama

⁶⁵*Ibid*, Suyuti Pulungan, hlm. 186.

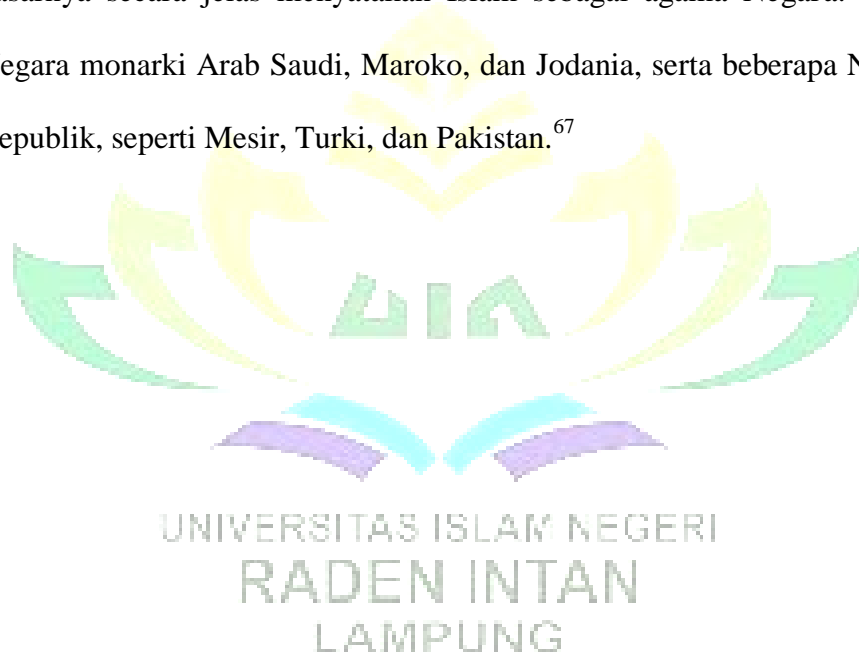
⁶⁶*Ibid*, Munawir Sjadzali, hlm. 228.

Negara, hanya Arab Saudi yang masih berbentuk monarki murnilah yang masih menjalankan syari'at bagi seluruh aspek kehidupan negaranya. Sedangkan yang lainnya, hanya menempatkan syari'at sebagai salah satu sumber hukum utama Negara disamping sumber-sumber hukum lainnya, termasuk hukum Barat. Satu hal yang perlu dicatat dari uraian di atas adalah tidak terdapat klausul yang menjamin bahwa tidak akan diundangkan undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, padahal Negara-negara tersebut menyatakan Islam sebagai agama Negara.

Dari contoh-contoh Negara Islam tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem kekuasaan kehakiman (berdasarkan hukum tata negara Islam) pada saat ini telah mengalami banyak perubahan. Penerapannya tidak lagi dijalankan secara murni, bahkan di Negara-negara yang menyatakan secara tegas bahwa Islam adalah agama Negara. Bentuknya pun sudah berbeda. Jika pada masa awal Islam kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Peradilan *Madzhalim* dan *Qadhi al-Qudhat* dengan distribusi wewenang kekuasaan-kekuasaan Negara yang terpusat pada lembaga-lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman, maka pada saat ini lembaga-lembaga pelaksanaan kekuasaan kehakiman tersebut telah menjelma ke dalam berbagai bentuk dengan mekanisme distribusi wewenang yang hampir sama dengan Indonesia, yaitu menganut konsep pembagian kekuasaan. Sehingga pada Negara-negara Islam tersebut kekuasaan Negara juga terbagi ke dalam kekuasaan legislatif, eksekutif,

dan yudikatif, meskipun perangkat yang ada di dalamnya pada masing-masing Negara berbeda.

Secara garis besar sistem hukum dari sejumlah negara Islam yang ada pada masa sekarang, negara-negara yang didalam undang-undang dasarnya secara jelas menyatakan Islam sebagai agama Negara. Yaitu, Negara monarki Arab Saudi, Maroko, dan Jodania, serta beberapa Negara Republik, seperti Mesir, Turki, dan Pakistan.⁶⁷



⁶⁷Munawir Sjadzali, hlm. 221.

BAB III

KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM HUKUM TATA NEGARA INDONESIA

A. Pengertian Hakim

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, hakim diartikan sebagai orang yang mengadili perkara (dalam pengadilan atau mahkamah), juri atau penilaian.

⁶⁸Hakim merupakan pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili.⁶⁹ Hakim adalah orang yang mengadili perkara, pandai, budiman dan ahli, orang yang bijak. Sedangkan kehakiman adalah urusan hakim dan pengadilan, segala sesuatu yang berkenaan dengan hukum.⁷⁰

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.⁷¹

Dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim hanya disebut sebagai pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-undang. Lahirnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim dan hakim konstitusi disebut sebagai pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang

⁶⁸Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, 2008, hlm. 503

⁶⁹Pasal 1 angka 8 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

⁷⁰Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi keempat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 475

⁷¹Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 1 UU No. 48 Tahun 2009.

(Pasal 19). Hakim pengadilan dibawah Mahkamah Agung adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang berada pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung Pasal 31 Ayat (1). Dengan demikian hakim adalah pejabat negara yang memegang kekuasaan kehakiman yang diberikan wewenang untuk mengadili.⁷²

B. Sejarah Kelahiran dan Perkembangan Kekuasaan Kehakiman dalam Ketatanegaraan Indonesia

Sejarah dan perkembangan kekuasaan kehakiman di Indonesia tidak lepas dari sejarah pembentukan dan perkembangan konstitusi atau dasar negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Yaitu dimulai sejak tahap perencanaan Undang-Undang Dasar yang akan menjadi dasar Negara Republik Indonesia. Hal ini karena negara Indonesia yang bercorak kontinental menggunakan konstitusi sebagai sumber hukum formal.

Sejak awal perencanaan Undang-Undang Dasar, kekuasaan kehakiman sudah tertuang didalamnya. Yaitu pada Pasal 25 dan 26, BAB VII tentang kekuasaan kehakiman. Rancangan Undang-Undang Dasar ini disusun oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dengan Ketua P.T. Ir. Soekarno. Isinya terdiri dari 14 bab dan 42 Pasal yang menurut Muhammad Yamin dibagi kedalam tiga bagian, yaitu bagian pembuka berisi pernyataan kemerdekaan dan dasar-dasar negara,

⁷² Gusu Prayudi, *Tindak Pidana Korupsi dipandang Dalam Berbagai Aspek*, (Yogyakarta: Pena Pustaka, 2010), hlm.113-114.

bagian kedua mengenai hak-hak asasi manusia, dan bagian ketiga berisi pasal-pasal konstitusi.⁷³

Pada awal mengenai materi perundang-undangan kekuasaan kehakiman dimana dengan Mahkamah Tinggi atau Balai Agung. Tugas dari Balai Agung ini adalah membandingkan undang-undang, apakah sesuai dengan hukum adat, syari'ah, dan Undang-Undang Dasar.

Pada sidang selanjutnya, yaitu pada rapat lanjutan perancangan Undang-Undang Dasar tanggal 15 juli 1945, sehingga pada saat itu kekuasaan dalam negara Republik Indonesia dibagi kedalam enam kekuasaan, yaitu :

- 1) Kepala Negara dan Wakil Presiden
- 2) Dewan Perwakilan
- 3) Majelis Permusyawaratan seluruh Indonesia
- 4) Kementrian
- 5) Majelis Pertimbangan
- 6) Mahkamah Tinggi atau Balai Agung.⁷⁴

Pada sidang berikutnya, yaitu pada rapat kelanjutan perencanaan Undang-Undang Dasar tanggal 15 Juli 1945, Menurut Muhammad Yamin, Mahkamah Agung melakukan kekuasaan kehakiman, serta membandingkan apakah UU yang disusun oleh DPR tidak melanggar UUD Republik Indonesia atau bertentangan dengan hukum adat, yang diakui dan syari'ah agama Islam.

⁷³ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Risalah Sidang Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 29 mei 1945-19 Agustus 1945, cet ke-2 (Jakarta: Sekretariat Negara, 1992), hlm. 148.

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 153.

Akhirnya, pada sidang tentang Susunan Pemerintahan dan pengesahan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945 di Gedung Tyuuoo Sangi-In Jakarta, Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Pasal 24 Ayat (1) dan (2), Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman.⁷⁵ Pasal tersebut berbunyi :

(1) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung, dan lain-lain badan Kehakiman.

(2) Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan UU.

Perkembang selanjutnya, setelah diberlakukannya kembali UUD 1945 dengan Dekrit Presiden, maka sesuai dengan ketentuan UUD 1945 tersebut, harus dibentuk lembaga-lembaga negara, yaitu :

- 1) Majelis Permusyawaratan Rakyat
- 2) Presiden
- 3) Dewan Pertimbangan Agung
- 4) Dewan Perwakilan Rakyat
- 5) Badan Pemeriksa Keuangan
- 6) Mahkamah Agung.⁷⁶

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 susunan Mahkamah Agung diatur dengan Undang-Undang nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan pokok Kekuasaan

⁷⁵*Ibid*, hlm. 321.

⁷⁶Soehino, *Hukum Tata Negara Sejarah Ketatanegaraan Indonesia*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Liberty, 1992), hlm. 148.

Kehakiman. Menurut Undang-Undang ini Mahkamah Agung berfungsi sebagai peradilan tertinggi yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:⁷⁷

1. Mengawasi jalannya peradilan pada pengadilan-pengadilan lain dengan jalan peradilan kasasi (Pasal 10 Ayat (2), (3), dan (4) Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman).
2. Mahkamah Agung berwenang untuk menilai peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang dengan alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang tingkatnya lebih tinggi (Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman). Alasan tentang tidak sahnya peraturan perundang-undang tersebut dapat diambil berhubung dalam rangka peradilan kasasi (Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman).

Namun dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 hanya disebutkan bahwa:⁷⁸

1. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.
2. Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang.

Serta dalam Pasal 25 disebutkan bahwa syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.⁷⁹

⁷⁷*Ibid*, hlm.155-156.

⁷⁸Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 sebelum amandemen, Pasal 24 Ayat (1) dan (2).

Setelah itu, sampai saat ini telah terjadi amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebanyak empat kali. Pada amandemen pertama dan kedua tidak ada perubahan pada Pasal 24 tentang Kekuasaan Kehakiman. Akan tetapi, pada amandemen ketiga terjadi perubahan, yaitu menjadi:⁸⁰

- (1). Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- (2). Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Ditambah dengan Pasal 24A tentang Mahkamah Agung, Pasal 24B tentang Komisi Yudisial, dan Pasal 24C tentang Mahkamah Konstitusi. Kemudian pada amandemen keempat, pasal 24 ditambah satu ayat lagi, yaitu:

- (3). Badan-badan lain yang berfungsi berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Sejarah Kekuasaan Kehakiman dari Masa ke Masa:

1. Masa Awal Kemerdekaan

Pada awal kemerdekaan, peraturan secara umum yang menjadi landasan adalah Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Pasal II Aturan Peralihan “*Segala Badan Negara dan peraturan yang masih ada masih langsung berlaku selama*

⁷⁹*Ibid*, Pasal 25.

⁸⁰Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ketiga, Pasal 24 Ayat (1) dan (2).

belum diadakan yang baru memuat UUD ini”, ketentuan ini berlaku juga pada penataan lembaga peradilan.

Dasar yang lain dari peradilan di Indonesia masa ini, adalah dalam Bab IX UUD 1945 tentang “Kekuasaan Kehakiman” yang hanya 2 Pasal yaitu Pasal 24 dan 25. Pada Pasal 24 ayat (1) disebutkan bahwa “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang” sedangkan Pasal 25 ayat (2) “Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan Undang-Undang”. Kemudian Pasal 25 mengatakan “untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan Undang-Undang”.⁸¹

2. Masa Pasca Kemerdekaan

Setelah kemerdekaan peraturan perundang-undangan menyangkut peradilan sebenarnya didasari oleh Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 bahwa peraturan warisan dari zaman kolonial Belanda masih berlaku sepanjang belum ada penggantinya, artinya masa ini pada dasarnya hanya melanjutkan peradilan-peradilan pada masa-masa sebelumnya yaitu pada masa jajahan kolonial dan pada masa Indonesia diduduki oleh bala tentara Jepang, hanya saja oleh Pemerintah Indonesia dibenahi, ditata sesuai dengan kebutuhan pada masa awal-awal kemerdekaan, serta penghapusan secara perlahan lembaga-lembaga peradilan yang tidak/ kurang sesuai dengan alam kemerdekaan bangsa Indonesia.⁸²

⁸¹ Badruzzaman Siddik, *Perkembangan Peradilan di Indonesia Sejak Zaman Kolonial Belanda Sampai Sekarang, Edisi Revisi Ke-2*, (Bandar Lampung: Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), hlm. 51-52.

⁸² *Ibid.*

3. Masa Orde Lama

Masa ini dimulai dari tahun 1959-1965, pada masa ini lahirnya UU tentang peradilan pada masa orla/demokrasi dipimpin pengaturan kekuasaan kehakiman tidak banyak mengeluarkan Undang-undang, karena masanya relatif singkat, juga karena mewarisi goncangan-goncangan politik pada masa sebelumnya. Karena UU Nomor 19 tahun 1948 tentang “Susunan Kekuasaan Badan-badan Kehakiman dan Kejaksaan” tidak sempat berlaku efektif, maka peradilan-peradilan sipil ditata dengan UU Darurat Nomor 1 tahun 1951 tentang “Tindakan-tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Susunan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil”. Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka semua landasan peraturan perundang-undangan tentu harus ditata berdasarkan landasan Konstitusi baru yaitu UUD 1945.

Pada periode demokrasi dipimpin ini ada dua UU yang menarik perhatian yaitu: pertama, UU Nomor 19 tahun 1964 tentang “Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman” LN. Nomor 167, TLN 2699 yang disahkan pada 31 Oktober 1964 dan ditanda tangani Pejabat Presiden Republik Indonesia waktu itu Dr. Subandrio; kedua, UU Nomor 13 tahun 1965 tentang “Peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung” LN Tahun 1965 Nomor 70, TLN 2767 yang disahkan pada 6 Juli 1965 dan ditanda tangani Pejabat Presiden Dr.J.Leimena.

4. Masa Orde Baru

Pada masa orde baru produk hukum yang berkenaan dengan peradilan hingga tahun 1998 dapat diketengahkan sebagai berikut:

- 1) UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, UU ini disahkan pada tanggal 17 Desember 1970 sebagai pengganti UU Nomor 19 tahun 1964 berisi VIII Bab dan 42 Pasal, dalam UU ini terdapat banyak kemajuan dari segi muatan UU (walaupun ada kelemahannya) dibandingkan dengan UU Nomor 19 Tahun 1964.
- 2) UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebelum UU ini keberadaan dan fungsi MA dipertegas dengan TAP MPR Nomor VI/MPR/1973 dan TAP MPR Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tinggi Negara. UU Nomor 14 tahun 1985 terdiri dari VII Bab dengan 82 Pasal sebagai pelaksanaan dari UU Nomor 6 tahun 1969 dan juga sebagai pelaksana dari UU Nomor 14 tahun 1970.
- 3) UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, jika UU Nomor 13 tahun 1965 tentang Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung yang mengatur dua peradilan dalam satu UU, maka UU Nomor 2 tahun 1986 khusus mengatur Peradilan Umum. UU lama Nomor 13 tahun 1965, dinyatakan tidak berlaku oleh UU Nomor 6 Tahun 1969, tetapi pernyataan tidak berlakunya dimulai pada saat UU penggantinya diundangkan. UU Nomor 2 tahun 1986 diundangkan pada tanggal 8 Maret 1986 setelah dua dasawarsa Peradilan Umum dibawah naungan UU lama. UU ini terdiri dari VI Bab dan 71 Pasal sebagai kelanjutan dari amanat UU Nomor 14 tahun 1970.

- 4) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimasa demokrasi terpimpin PTUN belum dibentuk, artinya pengadilan ini adalah hal baru dalam rangka pelaksanaan UU Nomor 14 tahun 1970. UU ini memuat VII Bab dan 145 Pasal yang diundangkan pada 29 Desember 1986.
- 5) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-undang ini merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- 6) UU Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, UU ini terdiri dari VIII Bab dan 353 Pasal yang diundangkan pada tanggal 15 Oktober 1997.
- 7) UU lain yang berkaitan dengan peradilan, diantaranya; (UU Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak, UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU Nomor 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, UU Nomor 12 tahun 1995 tentang Permayarakatan, UU Nomor 28 tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU Nomor 4 tahun 1998 tentang Peradilan Niaga).⁸³

5. Masa Reformasi

Keberhasilan MPR mengamandemen, Undang-undang Dasar Repeblik Indonesia (UUD NRI 1945) terutama yang menyangkut Kekuasaan Kehakiman sebagai buah kerja keras MPR, khususnya pada Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 merupakan hasil amandemen ketiga (9 november 2001)

⁸³ *Ibid*, Badruzzaman Siddik, hlm. 124-144.

kecuali satu ayat yaitu Pasal 24 ayat (3) sebagai hasil amandemen keempat (10 Agustus 2002).

Adapun Pasal-pasal lainnya akan dibicarakan bersamaan dengan membicarakan Undang-undang produk masa reformasi. Sejak reformasi bergulir, produk hukum perundang-undangan berkaitan dengan peradilan adalah sebagai berikut:

- 1) UU Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 2) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- 3) UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 4) UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- 5) UU Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- 6) UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- 7) UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama, dan
- 8) UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (KY).
- 9) UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- 10) UU terbaru yaitu UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dengan demikian, sejak rancangan awal sampai amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945. Kekuasaan kehakiman telah diatur didalamnya. Akan tetapi, karena perubahan kondisi bangsa Indonesia, terutama kondisi politik, kekuasaan kehakiman pun mengalami perubahan dari waktu ke waktu sesuai dengan keadaan tersebut, sehingga seperti saat ini.

C. Dasar Hukum Kekuasaan Kehakiman di Indonesia

Prinsip-prinsip dan dasar hukum kekuasaan kehakiman adalah sebagai berikut:

1. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka, yaitu tertuang dalam pasal 1 undang-undang no.48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi:
“kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”⁸⁴
Hal yang sama juga disebut dalam pasal 24 ayat (1) undang-undang dasar 1945 dengan redaksi yang sedikit berbeda.
2. Penyelenggara kekuasaan kehakiman, yaitu tertuang dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 kekuasaan kehakiman, yaitu berbunyi “penyelenggara kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan

⁸⁴Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1 ayat 1.

peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”⁸⁵.

3. Peradilan dilakukan demi Ketuhanan Yang Maha Esa, yaitu tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi: “Peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA””⁸⁶.
4. Seluruh peradilan yang ada menegakkan hukum berdasarkan Pancasila, yaitu tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi: “peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila”⁸⁷.
5. Peradilan cepat dan sederhana, yaitu tertuang dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi: “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”⁸⁸.
6. Segala bentuk intervensi pihak-pihak diluar Kekuasaan Kehakiman kecuali dalam hal-hal yang telah disebut dalam UUD 1945, yaitu tertuang dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) serta Pasal 7 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

⁸⁵Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2.

⁸⁶Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat 1.

⁸⁷Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat 2.

⁸⁸Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat 4.

7. Mengadili demi hukum, yaitu tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi: “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.⁸⁹
8. Peradilan membantu para pencari keadilan, yaitu tertuang dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi: “Peradilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.”⁹⁰

Dalam rangka penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh badan-badan peradilan yang berwenang, sebagaimana disebutkan dalam beberapa undang-undang, maka dalam pelaksanaan mengacu pada asas-asas hukum umum kekuasaan kehakiman atau asas-asas umum peradilan yang baik (*Algemene Rechtsbegisellen Van Behoorlijk Rechtspraak*)⁹¹

Tentang asas-asas umum peradilan yang baik, khususnya hukum perdata, terdapat perbedaan penyebutan dalam beberapa literatur. Oleh karena itu, dalam penelitian ini asas-asas tersebut disimpulkan menjadi asas-asas kekuasaan kehakiman sebagai berikut:

1. Asas kebebasan hakim
2. Hakim bersifat menunggu (*iudex ne procedat ex officio*)
3. Pemeriksaan berlangsung terbuka

⁸⁹Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 4 ayat 1.

⁹⁰Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 4 ayat 2.

⁹¹Bambang Sutyoso, dkk, *Aspek-Aspek Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Pres, 2005), hlm.22.

4. Hakim aktif dalam persidangan
5. Asas kesamaan
6. Asas objektivitas
7. Putusan disertai alasan

Akan tetapi, dalam hukum acara pidana, terdapat sedikit perbedaan asas-asas atau prinsip-prinsip hukum. Asas-asas tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:⁹²

1. Asas legalitas
2. Perlakuan yang sama di muka hukum
3. Asas praduga tak bersalah
4. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dilakukan berdasarkan perintah tertulis pejabat yang berwenang
5. Asas ganti rugi dan rehabilitasi
6. Tersangka/terdakwa berhak mendapat bantuan hukum
7. Pemeriksaan perkara pidana di pengadilan dilakukan dengan hadirnya terdakwa
8. Peradilan dibuka untuk umum

Secara umum asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diatur dalam Bab II Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 2, dan Pasal 3. Dengan adanya asas-asas kekuasaan kehakiman tersebut (secara keseluruhan) diharapkan tujuan diadakannya peradilan dapat tercapai, benar-benar dapat menegakkan

⁹²Muhammad Taufik Makarao, dan Suharsil, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, cet ke-1 (Jakarta: Ghalia Indah, 2004), hlm. 2-9.

hukum dan keadilan, serta dapat melindungi dan memberikan hak-hak kepada yang berhak menerimanya.

Berdasarkan prinsip-prinsip yang telah disebutkan diatas, maka yang menjadi dasar hukum dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman yaitu peraturan-peraturan yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Peradilan Umum, serta peraturan-peraturan lainnya, baik peraturan perundang-undangan maupun peraturan-peraturan yang lain, termasuk Pancasila.

D. Fungsi dan Wewenang Kehakiman dalam Hukum Tata Negara Indonesia

Hakim merupakan pelaku inti dari sebuah perkara yang ditanganinya, dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman hakim haruslah memahami ruang lingkup tugas dan kewajibannya yang telah diatur di dalam Undang-undang. Dalam hal menjalankan dan menyelesaikan tugas dan wewenangnya, hakim diharapkan mengupayakan kerja yang profesional dan maksimal.⁹³

Hakikatnya tugas hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

⁹³Bambang Sutyoso, dkk, *Aspek-Aspek Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Pres, 2005), hlm.125.

Meskipun demikian, tugas dan kewajiban hakim dapat diperinci lebih lanjut dengan menjelaskan satu-persatu tugas hakim yang ada di Indonesia.

Secara umum, terdapat tiga jenis hakim di Indonesia, yaitu hakim agung (hakim pada Mahkamah Agung), hakim konstitusi (hakim pada Mahkamah Konstitusi), dan hakim lain yang tugasnya bersifat khusus dan sementara.⁹⁴

Dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dikemukakan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.⁹⁵



Berikut ini tugas dan wewenang hakim yang ada di Indonesia:

1. Hakim pada Mahkamah Agung

Hakim Agung merupakan hakim yang berada dalam Mahkamah Agung. Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi negara sebagaimana dimaksudkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1978.⁹⁶ Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan, yang dalam melaksanakan

⁹⁴Sulistyo Adi Rukmono, "Etika Propesi Hakim Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Terhadap Kode Etik Profesi Hakim)", Skripsi UIN Raden Intan Lampung (2017), hlm. 47.

⁹⁵Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 18.

⁹⁶Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Pasal 1 ayat 1.

tugasnya terlepas dari pengaruh-pengaruh lain.⁹⁷ Mahkamah Agung merupakan pengadilan tingkat kasasi yang berkedudukan di Ibu kota negara.

Mahkamah Agung terdiri dari Pimpinan, Hakim Aggota, Panitera, dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung. Pemimpin Mahkamah Agung terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, dan beberapa orang Ketua Muda.

Mahkamah Agung memiliki fungsi sebagaimana diamanahkan dalam BAB III Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yaitu pada pasal 28 hingga 38.

Dalam pasal 28 dijelaskan bahwa Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus permohonan kasasi; sengketa tentang kewenangan mengadili; permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁹⁸

Mahkamah Agung memiliki wewenang memutus permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat Terakhir dari semua Lingkungan Peradilan. Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan.⁹⁹

Mahkamah Agung juga memiliki wewenang yang berkaitan langsung dengan konstitusi. Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara

⁹⁷Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Pasal 1 ayat 2.

⁹⁸Lihat Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Pasal 28 ayat 1.

⁹⁹Lihat Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Pasal 29 ayat 30.

materil hanya terhadap peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang. Mahkamah Agung berwenag menyatakan tidak sah semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah dari pada undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.¹⁰⁰

Selain bertugas dalam mengadili suatu perkara, hakim agung berwenang memberikan pertimbangan kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam permohonan grasi dan rehabilitasi.¹⁰¹ Mahkamah Agung juga dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum baik diminta maupun tidak kepada Lembaga Tinggi Negara yang lain.

Seiring dengan menjalankan tugasnya, hakim agung harus menjalankan kewajibannya yang telah dituangkan dalam undang-undang. Hakim sebagai lembaga penegak keadilan harus menerima pengaduan seseorang yang memiliki perkara hukum dan memohon bantuan hukum. Hakim tidak boleh menolak pengaduan setiap orang atas dasar apapun.¹⁰²

Selain kewajiban-kewajiban diatas, Mahkamah Agung harus memberi akses kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai putusan Mahkamah Agung dan atau biaya dalam proses pengadilan.¹⁰³ Hal ini agar hukum terlihat secara transparan dan dapat diterina oleh tiap-tiap pihak.

2. Hakim pada Badan Peradilan

¹⁰⁰Lihat Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Pasal 31 ayat 2.

¹⁰¹Lihat Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Pasal 35.

¹⁰²Lihat Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Pasal 16 ayat 1.

¹⁰³Lihat Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Pasal 32B.

Sesuai dengan undang-undang, terdapat badan peradilan yang memiliki kedudukan dibawah Mahkamah Agung. Badan peradilan terdiri dari beberapa badan peradilan, yakni badan peradilan dalam lingkugan peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara dan peradilan militer.

Badan peradilan memiliki dua tingkatan yakni Peradilan Negeri yang berkedudukan di kotamadya/kabupaten yang memiliki daerah hukum meliputi daerah kotamadya/kabupaten dan Pengadilan Tinggi Negeri yang berkedudukan di wilayah provinsi dengan daerah hukum meliputi daerah provinsi.

a. Tugas dan Kewajiban Hakim pada Badan Pengadilan Umum

Tugas dan kewajiban Hakim pada Badan Peradilan Umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

Pengadilan negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding. Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya. Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta.¹⁰⁴

¹⁰⁴Lihat Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Pasal 50-52.

Sedangkan kewajiban Peradilan Umum yaitu Peradilan wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan. Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan.¹⁰⁵

b. Tugas dan Kewajiban Hakim pada Badan Peradilan Agama

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu.¹⁰⁶

Sebagai penegak keadilan yang berkaitan dengan agama di daerah Kabupaten dan daerah provinsi, Peradilan Agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Peradilan Agama bertugas dan bewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, harta, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.¹⁰⁷

¹⁰⁵Lihat Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Pasal 52A.

¹⁰⁶Lihat Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Pasal 2.

¹⁰⁷Lihat Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Pasal 49.

Apabila terjadi sengketa hak milik yang berkaitan dengan hal-hal di atas dengan subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, maka pengadilan agama berwenang mengadili dan memutus perkara.¹⁰⁸

Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi wewenang Pengadilan Agama Agama dalam tingkat banding. Pengadilan Tinggi Agama juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya.¹⁰⁹

Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.¹¹⁰ Pengadilan agama memberikan istbat kesaksian rukyah hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah.¹¹¹

Sedangkan kewajiban hakim di pengadilan agama tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya.¹¹²

c. Tugas dan Kewajiban Hakim pada Badan Peradilan Tata Usaha Negara

¹⁰⁸Lihat Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Pasal 50 ayat 2.

¹⁰⁹Lihat Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Pasal 51 ayat 1.

¹¹⁰Lihat Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Pasal 52 ayat 1.

¹¹¹Lihat Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Pasal 52A ayat 1.

¹¹²Lihat Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Pasal 52A ayat 2.

Pengadilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara.¹¹³

Sebagai penegak keadilan yang berkaitan dengan tata usaha negara di daerah Kabupaten dan daerah Provinsi, Peradilan Umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Peradilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara,¹¹⁴ dengan menyelesaikan secara administratif sengketa Tata usaha Negara.

Peradilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara juga bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Tata Usaha Negara di dalam daerah hukumnya.¹¹⁵

Sebelum memeriksa pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas. Dalam pemeriksaan persiapan setiap sengketa, Hakim wajib memberi nasihat kepada

¹¹³Lihat Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Pasal 4.

¹¹⁴Lihat Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Pasal 47.

¹¹⁵Lihat Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Pasal 5-6.

penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari. Hakim dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan.¹¹⁶

d. Peradilan Militer

Peradilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman dilingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.¹¹⁷

Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer terdiri dari Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran.¹¹⁸

Tempat kedudukan Pengadilan Militer Utama berada di Ibukota Negara Republik Indonesia yang daerah hukumnya meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.¹¹⁹ Nama, tempat kedudukan dan daerah hukum pengadilan lainnya ditetapkan dengan Keputusan Panglima.¹²⁰

Sebagai penegak keadilan yang berkaitan dengan militer, Peradilan Militer diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan

¹¹⁶Lihat Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Pasal 49.

¹¹⁷Lihat Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 Pasal 5 ayat 1.

¹¹⁸Lihat Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 Pasal 12.

¹¹⁹Lihat Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 Pasal 14 ayat 1.

¹²⁰Lihat Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 Pasal 14 ayat 2.

Militer. Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer memiliki wewenang yang mengadili perkara militer.

Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang Prajurit, orang yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit, orang yang menjadi anggota suatu golongan atau jabatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang dan seseorang yang oleh Panglima dilimpahkan kepada badan peradilan militer.¹²¹

Namun berbagai tugas dan wewenang yang diberikan tersebut tidak akan berlaku apabila terjadi suatu kondisi tertentu. Sebagaimana bunyi pasal 4, bahwa “Pengadilan Militer Tinggi tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam atau keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.¹²²

3. Hakim pada Mahkamah Konstitusi

Lembaga lain yang memiliki peran dalam penegakan keadilan di Indonesia adalah mahkamah Konstitusi. Lembaga yang dibentuk pada tahun 2004 ini memiliki tugas tersendiri sebagai lembaga yang independen tanpa campur tangan lembaga lain. Sebagaimana bunyi pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Konstitusi bahwa “ Mahkamah Konstitusi merupakan salah

¹²¹Lihat Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 Pasal 49.

¹²²Lihat Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 Pasal 4.

satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan,¹²³

Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) orang anggota hakim konstitusi.¹²⁴ Susunan Mahkamah Konstitusi terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota hakim konstitusi.¹²⁵ Mahkamah Konstitusi berkedudukan di ibukota negara. Sama halnya dengan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi merupakan pejabat negara yang dibantu oleh sekretariat jenderal dan kepaniteraan.¹²⁶

Sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004, Mahkamah Konstitusi memiliki beberapa tugas dan kewenangan. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.¹²⁷

Mahkamah Konstitusi juga berkewajiban memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan,

¹²³Lihat Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 Pasal 2.

¹²⁴Lihat Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 Pasal 4 ayat 1.

¹²⁵Lihat Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 Pasal 4 ayat 2.

¹²⁶Lihat Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 Pasal 7.

¹²⁷Lihat Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 Pasal 10.

tindak pidana lainnya, atau perbuatan tercela, dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.¹²⁸

Selain memiliki tugas dan wewenang, Mahkamah konstitusi memiliki beberapa kewajiban yang harus dilakukan, yakni Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab mengatur organisasi, personalia, administrasi, dan keuangan sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik dan bersih. Mahkamah Konstitusi wajib mengumumkan laporan berkala kepada masyarakat secara terbuka mengenai permohonan yang terdaftar, diperiksa, dan diputus dan mengenai pengelolaan keuangan dan tugas administrasi lainnya.¹²⁹

4. Hakim Ad Hoc

Hakim *ad hoc* adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, megadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang. Hakim *ad hoc* dapat diangkat pada pengadilan khusus untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang membutuhkan keahlian dan pengalaman di bidang tertentu dalam jangka waktu tertentu.¹³⁰

Hakim *ad hoc* adalah hakim yang bertugas secara khusus dan bersifat sementara. Hakim *ad hoc* bukanlah pejabat negara seperti Hakim Agung atau

¹²⁸Lihat Pasal 10 Ayat 2

¹²⁹Lihat Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 Pasal 12 dan 13.

¹³⁰Lihat Undang-Undang No. 48 Tahun 2008 Pasal 32.

hakim Konstitusi. Hakim *ad hoc* dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diberikan tunjangan khusus.¹³¹

Tujuan diangkatnya hakim *ad hoc* adalah untuk membantu penyelesaian perkara yang membutuhkan keahlian khusus misalnya kejahatan perbankan, kejahatan pajak, korupsi, anak, perselisihan hubungan industrial, telematika (*cyber crime*)¹³²



E. Kedudukan Kehakiman dalam Tata Negara Indonesia

Kedudukan kehakiman telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang tersebut dan didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Hakim dibatasi pada badan peradilan dibawah Mahkamah Agung. Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) amandemen ke-III Undang-Undang Dasar 1945 eksistensi badan peradilan hukum dibawah Mahkamah Agung yang meliputi empat lingkungan peradilan lingkungan peradilan yaitu, peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara yang disebutkan secara eksplisit dalam konstitusi

¹³¹Lihat Undang-Undang No. 48 Tahun 2008 Pasal 49 ayat 1.

¹³²Lihat Undang-Undang No. 48 Tahun 2008 Pasal 32 ayat 1.

sebagai alat perlengkapan negara yaitu sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman sehingga dapat dikelompokkan dalam institusi dasar negara bersama dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.¹³³

Sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia tidak banyak mengalami perubahan sejak awal kelahirannya. Artinya, meskipun terjadi perubahan mengenai independensi kekuasaan kehakiman, yang semula masih dapat diintervensi oleh pihak-pihak diluar kekuasaan kehakiman menjadi benar-benar mandiri, namun mengenai distribusi wewenang khususnya diantara kekuasaan-kekuasaan Negara lainnya, tidak banyak mengalami perubahan. Karena sejak rancangan awal Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pendistribusian wewenang tersebut telah dipisah-pisahkan kedalam enam lembaga pelaksana kekuasaan Negara (MPR, Presiden, DPA, DPR, BPK, MA). Pada saat ini lembaga pelaksana kekuasaan negara terdapat 8 (delapan) buah lembaga negara, kedelapan organ tersebut adalah (DPR, DPD, MPR, BPK, presiden dan Wakil Presiden, MA, MK, dan KY).¹³⁴ Sehingga sejak rancangan awal Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 lembaga-lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman hanya melaksanakan fungsi peradilan saja.

¹³³F. Manao, *Hakim Sebagai Pilihan Profesi*, artikel, ditulis untuk workshop pembekalan profesi hukum, diselenggarakan IKA PERMHI (Ikatan Alumni Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia), Jakarta, 19 Juli 2003

¹³⁴ Zuhraini, *Tata Negara Indonesia Dalam Kajian Terhadap Lembaga Negara Pasca Amandemen, Edisi Revisi* (Depok: Fakultas Syariah, 2010), hlm.124.

BAB IV

**STUDI KOMPARATIF KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA INDONESIA DAN HUKUM
TATA NEGARA ISLAM**

A. Fungsi dan Wewenang Kehakiman dalam Hukum Tata Negara Islam dan Hukum Tata Negara Indonesia.

1. Fungsi Kekuasaan Kehakiman

Fungsi Kekuasaan kehakiman menurut hukum tata Negara Islam yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang menjalankan fungsi peradilan serta menjalankan fungsi lain seperti fungsi administrasi Negara (seperti pencatat inventaris negara), fungsi badan pemeriksa keuangan Negara, serta sebagai pengawas pelaksana ibadah-ibadah pokok, seperti shalat berjam'ah, shalat jum'at, shalat hari raya, ibadah haji dan jihad.

Sedangkan fungsi kekuasaan kehakiman menurut hukum Tata Negara Indonesia kekuasaan kehakiman hanya menjalankan fungsi peradilan saja.

Fungsi yang dalam hukum tata Negara Islam seperti fungsi administrasi negara, fungsi badan pemeriksa keuangan negara, serta sebagai pengawas pelaksana ibadah-ibadah pokok, seperti seperti shalat berjam'ah, shalat jum'at, shalat hari raya, ibadah haji dan jihad. Fungsi tersebut di dalam hukum tata Negara Indonesia dilaksanakan oleh kekuasaan negara lainnya yang pembagiannya berdasarkan teori pembagian kekuasaan. Suatu contoh fungsi-fungsi lain di luar fungsi

peradilan, seperti fungsi administrasi negara dilakukan oleh lembaga/kekuasaan pemeriksaan keuangan negara (yang dilakukan oleh BPK), serta fungsi pengawasan terhadap masalah-masalah agama dilakukan oleh Departemen Agama, sehingga fungsi lain kekuasaan kehakiman dalam hukum tata negara Islam dalam hukum tata negara Indonesia fungsi tersebut dilaksanakan oleh lembaga/kekuasaan Negara lainnya.

Apabila dilihat dengan seksama, maka dapat dilihat bahwa kekuasaan kehakiman dalam hukum tata negara Islam berdasarkan teori tata Negara Islam klasik,¹³⁵ meliputi hampir seluruh aspek kehidupan bernegara. Hampir seluruh fungsi lembaga yang dalam hukum tata negara Indonesia dibagi ke dalam beberapa lembaga, sedangkan pada hukum tata negara Islam dijalankan oleh kekuasaan kehakiman saja.

2. Wewenang kekuasaan kehakiman

Berdasarkan konsep tata negara Islam klasik, pembagian wewenang diantara kekuasaan-kekuasaan negara lebih mengerucut yang seluruhnya berada di bawah kekuasaan kepala Negara (*khalifah*). Pembagian wewenang tersebut lebih terpusat pada lembaga-lembaga peradilan, yaitu peradilan *Madzalim* dan *Qadhi Al-Qudhat*. Hampir seluruh

¹³⁵ Yang dimaksud dengan teori tata Negara islam klasik adalah teori yang disebutkan oleh kitab-kitab fiqh klasik, yang inti ajarannya masih murni berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah Rasul, serta berdasarkan sejarah peradilan Islam sejak masa Nabi Muhammad Saw sampai kekhalifahan para sahabat. Sedangkan pada masa sekarang, ajaran-ajaran yang terdapat dalam kitab-kitab klasik tersebut telah bergeser dan pelaksanaannya telah banyak mengalami perubahan. Pergeseran dan perubahan tersebut dimungkinkan karena perbedaan kondisi masyarakat pada masa lalu dengan kondisi masyarakat saat ini.

aspek kehidupan bernegara menjadi wewenang lembaga-lembaga peradilan. Hal ini dapat dilihat dari distribusi wewenang yang secara umum adalah sebagai berikut:

k. Kewenangan *Madzalim* diantaranya:

1. Menangani pelanggaran pejabat pemerintah atas rakyat, untuk kemudian memberikan catatan yang buruk baginya.
2. Menangani tindakan-tindakan para pejabat yang mengambil harta (dari rakyat).
3. Bertugas sebagai pencatat pembukuan administrasi negara.
4. Menerima pengaduan para penerima gaji atas penyunatan gaji mereka atau keterlambatan pemberian gaji itu kepada mereka.
5. Mengembalikan harta yang dirampas dan dikorupsi oleh pejabat
6. Mengawasi harta wakaf.
7. Menangani kasus yang tidak mampu ditangani oleh para qadhi, yang disebabkan lemahnya kemampuan mereka untuk menanganinya atau keseganan mereka menghadapi pihak tertuduh.
8. Menangani kasus-kasus pelanggaran kepentingan umum yang sulit ditangani oleh pejabat biasa, seperti tindakan berbuat mungkar secara terang-terangan yang sulit diberantas, tindakan mengganggu kelancaran dan keamanan lalu lintas yang sulit dicegah, dan tindakan menahan hak orang lain yang sulit diminta.

9. Memperhatikan pelaksanaan ibadah-ibadah yang lahiriah, seperti pelaksanaan shalat hari Jumat, shalat hari raya, ibadah haji, dan jihad.
10. Menangani kasus penrtengkar dan memberikan keputusan hukum bagi pihak yang bersengketa.
1. Kewenangan *Qadhi al-Qudha* diantaranya:
 11. Menyelesaikan persengetaan dan permusuhan.
 12. Meminta suatu hak dari pihak yang menahan hak orang lain, kemudian menyampaikannya kepada pihak yang berhak setelah diketahui kepastian hukum itu merupakan haknya, melalui dua jalan: pengakuan atau adanya bukti.
 13. Menjadi wali atas orang yang dilarang untuk bertransaksi sendirian.
 14. Menangani harta wakaf .
 15. Melaksanakan wasiat berdasarkan syarat pihak yang memberikan wasiat dalam perkara yang diperbolehkan oleh syariat dan tidak dilarang.
 16. Menikahkan para wanita janda dengan orang-orang yang sekufu (setingkat statusnya).
 17. Melaksanakan hukum had atas pihak-pihak yang seharusnya dijatuhi hukum itu.

18. Memeriksa kemaslahatan wilayah tugasnya, seperti mencegah terjadinya kejahatan di jalan-jalan dan padang pasir, serta membongkar bangunan yang tidak layak dibangun atau dipertahankan keberadaannya.
19. Memeriksa saksi-saksinya serta para pembantunya dan memilih wakil-wakilnya serta mengakui dan mengandalkan mereka jika mereka berlaku benar dan lurus, serta mengalihkan dan mengganti mereka jika tampak cacat dan berkhianat.
20. Menyejajarkan dalam menangani masalah hukum manusia antara pihak yang lemah dan pihak yang kuat, dan bersikap adil dalam menetapkan keputusan antara pihak yang terhormat dan orang biasa, dan tidak mengikuti hawa nafsunya dalam mengurangi hak orang yang berhak atau condong pada kebatilan.

Adapun wewenang kekuasaan kehakiman dalam perspektif hukum tata negara Indonesia secara Umum adalah:

1. Memeriksa, mengadili dan memutus segala perkara yang diajukan kepadanya, mulai dari pengadilan tingkat pertama sampai tingkat kasasi (baik oleh PN, PA, PM, PTUN, maupun MA);
2. Menguji peraturan perundang-undangan (oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi)
3. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD (oleh Mahkamah Konstitusi);
4. Memutus pembubaran partai politik dan perselisihan tentang hasil pemilu (oleh Mahkamah Konstitusi)

5. Memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana lainnya, atau perbuatan tercela, dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar (oleh Mahkamah Konstitusi).

B. Persamaan dan Perbedaan antara Kekuasaan Kehakiman dalam Hukum Tata Negara Islam dan Hukum Tata Negara Indonesia.

1. Persamaan Kekuasaan Kehakiman

Sistem kekuasaan kehakiman baik dalam perspektif hukum tata Negara Islam maupun hukum Tata Negara Indonesia mempunyai tujuan yang sama, yaitu menegakkan hukum dan keadilan, agar terciptanya kehidupan masyarakat yang tertib, aman, damai, sejahtera, dan terlaksananya peraturan-peraturan yang telah dibuat, serta terwujudnya kemaslahatan umat.

2. Perbedaan kekuasaan kehakiman

- a. Sistem kekuasaan kehakiman yang digunakan dalam sistem hukum Tata Negara Islam yaitu, peraturan-peraturan yang dibuat berpedoman pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Oleh karena itu, dalam rangka menegakkan kehidupan pemerintahannya, kebijakan-kebijakan yang dihasilkan mencerminkan isi dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.

Sedangkan sistem hukum yang digunakan di Indonesia, adalah sistem hukum *coomon law*, yaitu menggunakan konstitusi sebagai sendi

utama dalam hukum kenegaraannya. Oleh karena itu, sebagai konsekuensi, seluruh peraturan yang ada disusun dan diberlakukan berdasarkan ketetapan-ketetapan yang ada dalam konstitusi tersebut, disamping berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara.

- b. Berdasarkan hal-hal tersebut, terdapat perbedaan antara kekuasaan kehakiman dalam perspektif Hukum Tata Negara Islam dan Hukum Tata Negara Indonesia, yaitu diantaranya perbedaan fungsi, pendistribusian wewenang, dan penerapan pada masa sekarang, sesuai dengan perkembangan zaman.

Misalnya fungsi kekuasaan kehakiman dalam hukum tata Negara Islam selain melaksanakan fungsi peradilan juga melaksanakan fungsi lain. Sedangkan kekuasaan kehakiman dalam hukum tata negara Indonesia kekuasaan kehakiman hanya melaksanakan fungsi peradilan atau fungsi-fungsi yang berkenaan dengan kekuasaan kehakiman saja. Seperti dalam hukum tata Negara Islam fungsi badan pemeriksa keuangan Negara, yang dalam hukum tata Negara Indonesia dilaksanakan oleh lembaga lain (BPK) Badan Pemeriksa Keuangan.

Perjalanan kekuasaan kehakiman dalam perspektif hukum tata negara Islam pun mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Pada setiap periode pemerintahan dan setiap wilayah (negara) memiliki sistem kekuasaan kehakiman sendiri sesuai dengan keadaan pada saat itu. Akan tetapi, Seluruh masih berpijak pada sumber hukum yang sama yaitu Al-Qur'an, sunnah Rasul, dan pendapat para ulama (*Ijma*).

Misalnya Arab Saudi, negara yang bercorak monarki murni. Al-Qur'an adalah Undang-Undang Dasar Negara dan Syari'ah sebagai sumber hukum dasar yang dilakukan oleh mahkamah-mahkamah syari'ah dengan ulama sebagai hakim-hakim dan penasehat-penasehat hukum (kerajaan) nya. Raja dengan dibantu oleh dewan menteri, mengawasi lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Di arab Saudi tidak terdapat dewan perwakilan yang anggota-anggotanya dipilih oleh rakyat, dan juga partai politik. Akan tetapi, yang ada adalah Majelis Syura yang anggota-anggotanya ditunjuk dan diangkat oleh raja. sekalipun demikian tidak dapat pula dikatakan bahwa kekuasaan raja di Arab Saudi itu mutlak dan tanpa batas, akan tetapi dibatasi oleh syari'ah, dan raja harus tunduk kepadanya. pelanggaran terhadap Illahi (hukum Allah) dapat dijadikan alasan atau dasar untuk menurunkan raja dari tahtanya. Seperti yang terjadi pada Raja Saud bin Abdul Aziz yang memerintah tahun (1953-1964) yang atas dasar kepentingan umum (*masalahah*), oleh sejumlah pangeran-pangeran senior Saudi, ulama dan pejabat tinggi kerajaan dianggap tidak layak lagi untuk memerintah, lalu diganti oleh saudara lakinya, Faisal, yang memerintah sampai pada tahun 1975.

Berbeda dengan Arab Saudi, Negara Maroko berbentuk monarki berkonstitusi sebagaimana disebutkan dalam undang-undang dasar negaranya bahwa Negara Maroko adalah kerajaan yang berkonstitusi dan demokratis, dan kedaulatan berada di tangan bangsa atau rakyat yang

disalurkan melalui lembaga-lembaga konstitusional yang telah ada. Juga dalam undang-undang dasarnya disebutkan bahwa Maroko menganut sistem banyak partai politik dan menolak sistem satu partai. Hukum adalah pernyataan tertinggi berada di tangan rakyat. Meskipun Islam disebut sebagai agama Negara, namun syari'ah Islam tidak disebut-sebut dalam undang-undang dasar Negara. Bahkan baik hukum perdata maupun pidananya, Maroko lebih banyak diwarnai oleh sistem hukum barat. Hukum Islam dari madzhab Maliki yang diberlakukan untuk umat Islam, hanya berlaku bagi permasalahan-permasalahan tertentu, yaitu perkawinan, pembagian harta warisan, dan wakaf, seperti di Indonesia.

Tidak jauh berbeda sistem hukum di Indonesia dan Maroko, sistem hukum Jordania banyak dipengaruhi oleh sistem hukum lain, khususnya Barat, meskipun agama Islam dinyatakan secara tegas sebagai agama Negara dan bahasa Arab sebagai bahasa resmi Negara. Sehingga hukum Islam yang diberlakukan bagi umat Islam terbatas pada permasalahan perkawinan, pembagian harta waris, dan perwakafan. Serta kekuasaan kehakiman dipegang oleh mahkamah-mahkamah yang mandiri dan menjatuhkan keputusan atas nama raja.

Sementara itu, kekuasaan legislatif berada di tangan parlemen, yang terdiri dari Senat, Dewan Perwakilan rakyat, dan Raja. Kekuasaan eksekutif berada di tangan raja yang dilaksanakan oleh para menteri.

Dari Undang-Undang Dasar Mesir atau Republik Arab Mesir tahun 1980, dinyatakan bahwa Mesir adalah Negara sosialis demokratis. Islam merupakan agama negara, Prinsip-prinsip hukum Islam merupakan salah satu sumber utamanya. Meskipun demikian, penerapan sistem hukum Islam (secara utuh) di Mesir juga hanya terbatas pada masalah-masalah perkawinan, pembagian harta waris, dan wakaf. Sedangkan untuk hukum perdata lainnya dan hukum pidana, sebagaimana tercantum secara jelas dalam undang-undang dasarnya, prinsip-prinsip hukum Islam hanya merupakan salah satu sumber hukum utama disamping sumber-sumber hukum yang lain.

Berbeda dengan Negara-negara Islam yang lain, Irak yang mempunyai nama asli Republik Iran Syi'ah sedang berproses untuk memberlakukan hukum Islam bagi semua aspek kehidupan (sistem ketata negaraannya).

Sama halnya dengan Indonesia dan Negara-negara demokratis lainnya, kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat, dan rakyat jugalah yang menjadi sumber kekuasaan Negara. Serta prinsip hukum Mesir menempatkan seluruh rakyatnya sama dimuka hukum.

Pada dasarnya di Pakistan terdapat kesadaran bahwa Islam adalah kekuatan dan hal yang tidak dapat dipisahkan dari Republik Islam Pakistan (nama resmi Pakistan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1956). Namun di Pakistan telah menjadi beberapa kali perubahan

dasar Negara. Hingga saat ini semangat Islam di negeri yang mayoritas penduduknya beragama Islam itu, masih mewarnai perjuangan kehidupan politiknya.

Namun secara garis besar, pada penelitian ini penyusun belum dapat menemukan bagaimana sistem hukum dan kekuasaan kehakimannya Pakistan secara jelas. Pada beberapa referensi yang ditemukan adalah pergolakan politik Pakistan yang selalu panas dan penuh dengan perdebatan tentang Islam sebagai alat politik itu sendiri.

Dari beberapa contoh Negara yang dalam Undang-Undang Dasar negaranya menyatakan secara jelas bahwa Islam adalah sebagai agama Negara, hanya Arab Saudi yang masih berbentuk monarki murni yang masih menjalankan syari'at bagi seluruh aspek kehidupan negaranya. Sedangkan yang lainnya, hanya menempatkan syari'at sebagai salah satu sumber hukum utama Negara disamping sumber-sumber hukum lainnya, termasuk hukum Barat. Satu hal yang perlu dicatat dari uraian di atas adalah tidak terdapat klausul yang menjamin bahwa tidak akan diundangkan undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, padahal Negara-negara tersebut menyatakan Islam sebagai agama Negara.

Dari contoh-contoh Negara Islam tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem kekuasaan kehakiman (berdasarkan hukum tata negara

Islam) pada saat ini telah mengalami banyak perubahan. Penerapannya tidak lagi dijalankan secara murni, bahkan di Negara-negara yang menyatakan secara tegas bahwa Islam adalah agama Negara. Bentuknya pun sudah berbeda. Jika pada masa awal Islam kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Peradilan *Madzolim* dan *Qadhi al-Qudhat* dengan distribusi wewenang kekuasaan-kekuasaan Negara yang terpusat pada lembaga-lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman, maka pada saat ini lembaga-lembaga pelaksanaan kekuasaan kehakiman tersebut telah menjelma ke dalam berbagai bentuk dengan mekanisme distribusi wewenang yang hampir sama dengan Indonesia, yaitu menganut konsep pembagian kekuasaan. Sehingga pada Negara-negara Islam tersebut kekuasaan Negara juga terbagi ke dalam kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, meskipun perangkat yang ada di dalamnya pada masing-masing Negara berbeda.

Berbeda dengan sistem kekuasaan kehakiman menurut hukum tata Negara Islam, sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia tidak banyak mengalami perubahan sejak awal kelahirannya. Artinya, meskipun terjadi perubahan mengenai independensi kekuasaan kehakiman, yang semula masih dapat diintervensi oleh pihak-pihak diluar kekuasaan kehakiman menjadi benar-benar mandiri, namun mengenai distribusi wewenang khususnya diantara kekuasaan-kekuasaan Negara lainnya, tidak banyak mengalami perubahan.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Fungsi dan Wewenang Kekuasaan Kehakiman

- a. Fungsi kekuasaan kehakiman dalam hukum Tata Negara Islam yaitu selain melaksanakan fungsi peradilan, berdasarkan teori tata negara klasik, juga melaksanakan fungsi lain seperti fungsi administrasi Negara, fungsi badan pemeriksa keuangan negara, dan sebagainya. Sedangkan kekuasaan kehakiman dalam perspektif hukum Tata Negara Indonesia hanya melaksanakan fungsi peradilan saja.
- b. Wewenang kekuasaan kehakiman dalam hukum Tata Negara Islam lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman lebih terpusat di bawah kekuasaan khalifah. Artinya, hampir seluruh aspek kehidupan berada dibawah kekuasaan kehakiman. Sedangkan wewenang kekuasaan kehakiman dalam hukum Tata Negara Indonesia terbagi kedalam beberapa kelompok lembaga Negara diantaranya lembaga MA yang membawahi lingkungan (PN, PA, PM, PTUN) dan oleh sebuah lembaga MK yang mempunyai wewenang masing-masing

2. Persamaan dan Perbedaan Kekuasaan Kehakiman

- a. Persamaan kekuasaan kehakiman baik dalam perspektif hukum tata Negara Islam maupun hukum Tata Negara Indonesia mempunyai

tujuan yang sama, yaitu menegakkan hukum dan keadilan, agar terciptanya kehidupan masyarakat yang tertib, aman, damai, sejahtera.

b. Perbedaan antara kekuasaan kehakiman dalam perspektif hukum tata Negara Islam dan Indonesia yaitu:

1. Adanya perbedaan sistem kekuasaan kehakiman dalam hukum tata negara Islam peraturannya berpedoman pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, sedangkan sistem kekuasaan kehakiman dalam tata Negara Indonesia peraturannya berpedoman pada konstitusi disamping berdasarkan Pancasila sebagai Dasar Negara.
2. Terdapat perbedaan fungsi dan wewenang. Fungsi kekuasaan kehakiman dalam tata Negara Islam selain melaksanakan fungsi peradilan juga melaksanakan fungsi lain. Sedangkan kekuasaan kehakiman dalam hukum tata negara Indonesia kekuasaan kehakiman hanya melaksanakan fungsi peradilan saja.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian dan mengetahui hasil penelitian maka penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Penelitian mengenai sistem hukum dan kedudukan kekuasaan kehakiman perlu untuk diteliti karena pada setiap perkembangan zaman akan adanya perubahan yang dilaksanakan oleh Negara-Negara muslim pada masa sekarang.
2. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan menjadikan kekurangan-kekurangan yang ada pada penelitian ini sebagai pelajaran dan

masuk agar penelitian yang dihasilkan dapat lebih memuaskan dan memenuhi standar penelitian yang baik.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qahar, Mas'ud Khasan, *Kamus Ilmiah Populer*, Jakarta, Bulan Bintang, 1989.
- Allaiddin Koto, *Sejarah Peradilan Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram Mim Adillatil Ahkaam*, Tasikmalaya: Pustaka Al-Hidayah, 2008, hadis No. 1417.
- Al-Khalaf, Abd Wahab, *Al-Siyasah wa al-Syariyah*, Kairo, Dar Ansor, 1977.
- Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Wal Wilayatud Diniyah, Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Jakarta, Gema Insani, 2000.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta Rineka Cipta, 1998.
- Badruzzaman Siddik, *Perkembangan Peradilan di Indonesia Sejak Zaman Kolonial Belanda Sampai Sekarang, Edisi Revisi Ke-2*, Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014.
- Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa*, Cet Ke-1, Yogyakarta. UII Press, 2005.
- Bambang Sutiyoso, dkk, *Aspek-Aspek Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta: UII Pres, 2005.
- C.S.T. Kansil, dan Cristine S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Dewan Redaksi, *Sejarah Peradaban Islam dari Masa Klasik Hingga Modern*, Cet ke-1, Yogyakarta: Jurusan SPI Fakultas Adab dan LESFI, 2003.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 2, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoven, 1997.

- F.Manao, *Hakim Sebagai Pilihan Profesi*, artikel, ditulis untuk workshop pembekalan profesi hukum, diselenggarakan IKA PERMHI, Jakarta, 19 Juli 2003
- Gusu Prayudi, *Tindak Pidana Korupsi dipandang Dalam Berbagai Aspek*, Yogyakarta: Pena Pustaka, 2010.
- Hasan Mu'arif Ambari, *Ensiklopedi Islam*, cet ke-1 jilid 2, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Ibnu Khaldun, *Muqadimah Ibnu Khaldun*, Ahli Bahasa Ahmadi Tuha, cet ke-2, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.
- Inu Kencana Syafi'ie, *Al-Qur'an Dan Ilmu Politik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Inu Kencana Syafi'e, *Ilmu Pemerintahan Dan Al-Qur'an*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Imam al-Mawardi, *Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*, cet ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Kaelan, M.S., *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Yogyakarta, Pradigma, 2005.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi keempat, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- Koentjorodinigrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka, 1993
- Meleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 2002,
- Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam*, Yogyakarta: PT. LKIS, 2010.
- Muhammad Salam Makdur, *Peradilan Dalam Islam*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993.
- Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara, Ajaran, sejarah, dan Penikiran*, Cet ke-5, Jakarta: UI Press, 1993.
- Muhammad Taufik Makarao, dan Suharsil, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, cet ke-1 Jakarta: Ghalia Indah, 2004.

Samir Aliyah, Alih Bahasa Asmuni Solihah Zamaksyari, Sistem Pemerintahan, Peradilan dan Adat dalam Islam, Jakarta: Khalifa, 2004.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Risalah Sidang Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 29 mei 1945-19 Agustus 1945, cet ke-2, Jakarta: Sekretariat Negara, 1992.

Soehino, *Hukum Tata Negara Sejarah Ketatanegaraan Indonesia*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Liberty, 1992.

Subagyo, Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 1994.

Sulistyo Adi Rukmono, "Etika Propesi Hakim Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Terhadap Kode Etik Profesi Hakim)", Skripsi UIN Raden Intan Lampung 2017.

Susiadi, *Metodelogi Penelitian*, Bandar Lampung, Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung , 2015

Suyuti pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

T M Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, cet, ke-2, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.

Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, 2008.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Surakarta: CV.Ita.

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Wildan Suyuti, *Kode Etik Hakim*, Jurnal Pusdiklat MARI Volume I, No 2, Jakarta.

Zuhraini, *Tata Negara Indonesia Dalam Kajian Terhadap Lembaga Negara Pasca Amandemen, Edisi Revisi*, Depok: Fakultas Syariah, 2010.